



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja BBTCLPP (BBTKLPP) Yogyakarta Tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada BBTCLPP Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2020 dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya, yang disusun berdasarkan data hasil pelaksanaan program dan keuangan periode tahun anggaran 2020. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang diberikan kepada BBTCLPP Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Yogyakarta, Januari 2021

Kepala BBTCLPP Yogyakarta,



Dr. dr. Eene, MKM

NIP.197206032002122008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perkembangan paradigma pemerintahan menuju ke arah *Good Governance* dan penciptaan administrasi yang berdaya guna, berhasil guna dan berkeadilan, telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Terhadap tuntutan ini, BBTCLPP Yogyakarta mencoba mewujudkan, salah satunya dengan menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, yang disusun pada awal tahun, sebagai bagian dari penjabaran Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi-1 periode tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja BBTCLPP Yogyakarta dilakukan terhadap 8 (delapan) indikator.

Hasil pengukuran indikator menunjukkan bahwa 12,5% dari indikator telah sesuai target dan 87,5% di atas target. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja tahun 2020 semua indikator (100%) tercapai dengan rerata persentase capaian sasaran sebesar 133,44%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 94,14% dari total pagu. Dengan melihat capaian target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja BBTCLPP Yogyakarta tahun 2019 telah dilaksanakan, dengan efisiensi sebesar 29,74%.

Capaian target kinerja ini dapat berhasil karena didukung berbagai faktor, antara lain: 1) Kerjasama dan upaya koordinasi dengan institusi di wilayah kerja; 2) Peningkatan kapasitas teknis pejabat fungsional dengan melaksanakan dan mengikuti pelatihan teknis pendukung; 3) Optimalisasi pelayanan instalasi pelayanan dan teknis dan laboratorium kepada konsumen; 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan; 5) Dukungan anggaran dan pengelolaan administrasi kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VII
BAB I.....	1
BAB II.....	11
A. PERENCANAAN KINERJA.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
BAB III.....	63
B. REALISASI ANGGARAN.....	63
C. PENGHARGAAN.....	65
BAB IV.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. TINDAK LANJUT.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur per 1 Januari 2020	8
Gambar 2. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2020	9
Gambar 3. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur	9
Gambar 4. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Gambar 5. Bagan Organisasi BBTCLPP menurut Peraturan Menteri Kesehatan.....	10
Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi untuk Indikator “Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan” BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020	17
Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan” Tahun 2020 .	17
Gambar 8. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator “Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan” Tahun 2020.....	26
Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan” ...	29
Gambar 10. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator “Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam” Tahun 2019 dan 2020....	35
Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang Dari 24 Jam” Tahun 2020	36
Gambar 12. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator “Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam” Tahun 2020.....	40
Gambar 13. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator “Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan” Tahun 2019 dan 2020	42
Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan” Tahun 2020	43

Gambar 15. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator “Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan” Tahun 2020 dan 2019.....	45
Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Nilai Kinerja Anggaran” Tahun 2020	48
Gambar 17. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan” Tahun 2020	52
Gambar 18. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Kinerja Implementasi Satker WBK” Tahun 2020.....	55
Gambar 19. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL” Tahun 2020	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Awal.....	12
Tabel 2. Target Kinerja Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Revisi-1	13
Tabel 3. Matriks Perjanjian Kinerja Revisi-3 BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020	14
Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Revisi-1 BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024	15
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2020	63

BAB I PENDAHULUAN

BBTKLPP Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP dan PL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit.

Visi BBTCLPP Yogyakarta mengacu kepada visi pemerintah, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**.

Pencapaian visi di atas diwujudkan melalui misi: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

BBTKLPP Yogyakarta ikut berperan dan berkontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.

Tujuan BBTCLPP Yogyakarta dalam mendukung pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka pencapaian program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:

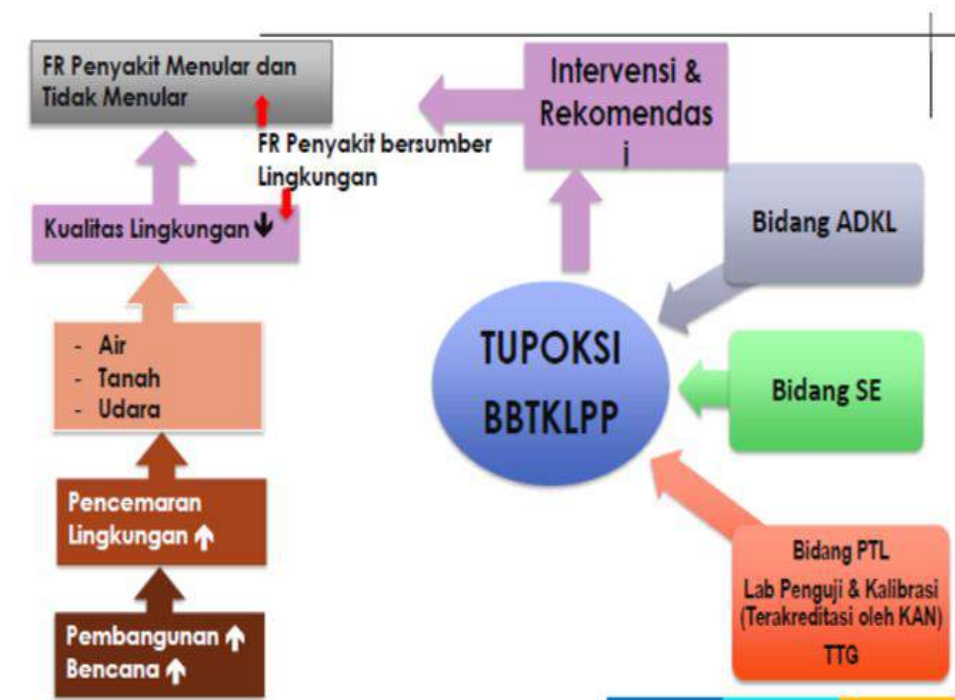
“Mewujudkan peningkatan pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit”

Dukungan BBTCLPP Yogyakarta terhadap Ditjen P2P diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P, yaitu: peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai UPT Kemenkes yang berada di daerah, dengan wilayah layanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini, BBTCLPP Yogyakarta berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pemecahan masalah pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di wilayah Provinsi DIY

dan Jawa Tengah. Secara regional BBTCLPP Yogyakarta berkedudukan sangat strategis dalam upaya pemecahan masalah pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan khususnya di daerah perbatasan kedua wilayah layanannya.

Peran BBTCLPP Yogyakarta untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit didukung oleh 3 bidang, yaitu Bidang Surveilans Epidemiologi, Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, dan Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium, dalam rangka *prevent, detect and response* melalui penyelenggaraan kajian, uji dan solusi terhadap determinan-determinan kesehatan khususnya faktor resiko penyakit menular maupun tidak menular bersumber dari manusia, binatang maupun bersumber dari lingkungan.



Selain perannya yang merujuk pada tugas fungsi pada Permekes No. 2349/MENKES/PER/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BBTCLPP Yogyakarta memiliki amanah dalam mendukung penguatan laboratorium di wilayah kerjanya melalui SK Gubernur DIY No. 97/KEP/2014 Tanggal 25 April 2014, SK Gubernur Jaawa Tengah No. 660.1/23/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, registrasi kompetensi laboratorium lingkungan oleh KemenLH dan sesuai Permenkes No. 658 tahun 2009 sebagai laboratorium pelaksana diagnosis penyakit PIE.

Arah kebijakan nasional pembangunan kesehatan periode tahun 2020 – 2024 berdasarkan Renstra 2020-2024 Kemenkes RI adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif,

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Hal ini menjadi acuan dalam upaya merespon *issue-issue* strategis yang muncul khususnya di wilayah kerja BBTCLPP Yogyakarta.

Penanggulangan KLB dan Bencana. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan upaya memantau secara terus-menerus penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membutuhkan respon cepat. SKDR mengamati 23 penyakit berpotensi KLB melalui portal online yang sewaktu-waktu dapat memberikan sinyal KLB jika melebihi nilai ambang batas pada masing-masing penyakit. Untuk melakukan SKDR ini, diperlukan surveilans faktor risiko penyakit portensial KLB berbasis laboratorium.

Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 13 KLB yang terjadi di Jawa Tengah, 10 kejadian (77%) yang ditangani <24 jam; di DIY 1 dari 2 kejadian (50%). Salah satu KLB di Jawa Tengah adalah KLB campak yang terjadi 2 kali dengan jumlah penderita 21 kasus, yang terdiri dari 5 kasus konfirmasi (23,81%) dan 16 kasus negatif (76,19%).

Pencegahan dan pengendalian penyakit Malaria. Malaria adalah penyakit yang mengancam keselamatan jiwa yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Program malaria telah mencapai indikator *Millenium Development Goals* (MDG's), selanjutnya malaria masuk dalam indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam target 3.3 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya. Laporan WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia masih berada pada fase pemberantasan. Hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi nasional Malaria berdasarkan riwayat positif Malaria melalui pemeriksaan darah oleh nakes adalah 0,37%. Angka di DIY dan Jawa Tengah jauh di bawahnya, yaitu 0,08% di DIY dan 0,03% di Jawa Tengah. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, *Annual Parasite Incidence* (API) tahun 2019 di Indonesia cenderung menurun pada angka 0,93/1.000 penduduk. API di DIY dan Jawa Tengah sudah memenuhi target nasional dengan tercapainya API 0,00/1.000 penduduk di DIY dan 0,01/1.000 penduduk di Jawa Tengah. DIY dan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi 100% Kabupaten/kota-nya memiliki API <1/1.000 penduduk, bahkan sebagian besar sudah dinyatakan bebas malaria dan mendapat sertifikat Eliminasi Malaria dan tinggal sebagian kecil wilayah dengan endemisitas rendah. Untuk meyakinkan bahwa situasi ini sudah terkendali, pemantauan kasus malaria tetap perlu dilakukan.

Eliminasi Filariasis dan Pengendalian Penyakit Kecacingan. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi Filariasis nasional adalah 0,8%. Angka ini sama dengan angka di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di DIY lebih rendah (Jawa Tengah: 0,8%; DIY: 0,5%). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ke-6 tertinggi jumlah kasus filariasis di Indonesia (402 kasus), berbanding terbalik dengan DIY yang menempati urutan ke-2 terendah (3 kasus). Pada

tahun 2019, terdapat dari 9 Kabupaten/Kota endemis filariasis di Jawa Tengah, 8 di antaranya masih melaksanakan POPM, serta belum ada yang berhasil menurunkan Mf rate <1%.

Sebagai upaya mensukseskan eliminasi filariasis dan pengendalian kecacingan, terutama di Provinsi Jawa Tengah, BBTCLPP Yogyakarta sebagai UPT memberikan dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui kegiatan Layanan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit tahun 2020 dengan melakukan Surveilans Penyakit Filariasis dan Kecacingan dalam bentuk: 1) Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria Pasca POPM Filariasis (pre-TAS), di 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Pekalongan, Pati, dan Blora; dan 2) Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan, di 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Demak dan Brebes.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, terlihat bahwa *Incidence Rate* DBD tahun 2019 di DIY menunjukkan angka 85,90/100.000 penduduk. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka di Provinsi Jawa Tengah dengan angka 26,28/100.000 penduduk, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,48/per 100.000 penduduk. Seluruh Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah terjangkit DBD. Sekalipun insidensinya tinggi, namun *Case Fatality Rate* (CFR) di DIY berada pada urutan ke-3 terendah (CFR: 0,18%), yang mana ini lebih rendah dibandingkan CFR nasional sebesar 0,67%. Sebaliknya, angka insidens yang rendah di Provinsi Jawa Tengah ternyata memiliki CFR yang tinggi (1,35%) dibandingkan CFR nasional dan DIY.

Pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis. Berdasarkan Riskesdas Tahun 2018, prevalensi TB di Provinsi Jawa Tengah dan DIY lebih rendah dibanding angka nasional sebesar 0,42% (DIY: 0,16%; Jawa Tengah: 0,36%). Sekalipun prevalensi di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding DIY, namun proporsi penderita yang minum obat secara rutin di Jawa Tengah lebih baik dibanding DIY (DIY: 70%; Jawa Tengah: 77,7%). *Case notification rate* (CNR) TB tahun 2019 di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding DIY (Jawa Tengah: 157/100.000 penduduk; DIY: 108/100.000 penduduk), namun angka ini masih di bawah angka nasional. Angka Keberhasilan Pengobatan TB secara nasional tercapai 86,6% atau di atas target WHO $\geq 85\%$. Angka ini sudah tercapai di Jawa Tengah (85,1%), namun tidak demikian halnya dengan DIY yang baru mencapai 84,3%.

Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular secara bermakna dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB masyarakat, dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. Pada tahun 2018 ditemukan 843.000 kasus TB. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Jawa Timur. Kasus TB di tiga provinsi tersebut 43% dari jumlah seluruh kasus TB di Indonesia. Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Angka notifikasi kasus (*Case Notification Rate – CNR*) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut

Prevalensi Diare. Melalui hasil Riskesdas tahun 2018, terlihat bahwa prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan secara nasional adalah 6,8%. Prevalensi ini lebih tinggi di Jawa Tengah dibandingkan DIY, bahkan di Jawa Tengah melebihi angka nasional (Jawa Tengah: 7,2%; DIY: 6,1%). Prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami, secara nasional adalah 8%. Untuk prevalensi kelompok ini, ternyata baik DIY maupun Jawa Tengah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding angka nasional (DIY: 8,5%; Jawa Tengah: 8,4%). Diare masih menjadi masalah kesehatan di Provinsi Jawa Tengah karena masih merupakan salah satu jenis KLB pada tahun 2018 dengan frekuensi 7 kali)

Penanggulangan *new emerging disease* COVID-19. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) yang diterbitkan Ditjen P2P (2020) menyebutkan bahwa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini pun masih belum diketahui. Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada Tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease, COVID-19*). Pada Tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara, termasuk ke Indonesia. Pada Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Dalam kurun waktu yang pendek, yaitu s.d. Tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 yang tersebar pada 24 Provinsi.

Sampai 27 Januari 2021, jumlah COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 1.024.298 kasus dengan 28.855 kematian (CFR 2,8%). Kasus ini terdistribusi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Jumlah COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120.001 kasus, sedangkan di DIY sebanyak 20.481 kasus (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-28-januari-2021>). Sekalipun selisih jumlah

kasus Jawa Tengah lebih banyak, namun angka insidens di DIY lebih tinggi (DIY: 0,75%; Jawa Tengah: 0,33%). Transmisi lokal terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di DIY (5 Kabupaten/Kota) dan Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota).

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Riskesdas tahun 2018 melaporkan penelitian beberapa penyakit tidak menular, antara lain *stroke*, hipertensi, kanker. Hasil menunjukkan bahwa prevalensi ketiga penyakit ini di DIY lebih tinggi dibanding Jawa Tengah, bahkan lebih tinggi dibanding angka nasional (kecuali hipertensi di Jawa Tengah). Prevalensi *stroke* berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur >15 tahun di DIY sebesar 14,60/00 dan di Jawa Tengah sebesar 11,80/00, sementara prevalensi nasional sebesar 10,90/00. Selain *stroke*, diperoleh hasil bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat antihipertensi pada penduduk umur >18 tahun di DIY sebesar 10,68% dan di Jawa Tengah sebesar 8,17%, sementara prevalensi nasional sebesar 8,36%. Penyakit tidak menular lain, yaitu kanker berdasarkan diagnosis dokter pada semua umur di DIY sebesar 4,860/00 dan Jawa Tengah sebesar 2,110/00. Kedua angka ini lebih tinggi dari angka prevalensi nasional (1,790/00).

Merujuk Renstra 2020 – 2024, salah satu tujuan Kemenkes yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P dan BBTCLPP Yogyakarta adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024
- b. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024
- c. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 Kabupaten/kota
- d. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 %
- e. Meningkatnya Kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 Kabupaten/kota
- f. Persentase Kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%

Selain tujuan yang disebutkan di atas, tujuan lain Kemenkes adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan ini adalah meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan Kabupaten/kota sebesar 100%

- b. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100%
- c. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58
- d. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95
- e. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)

Selaras dengan sasaran strategis pada Renstra Kemkes 2020-2024 tersebut dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai maka BBTCLPP Yogyakarta menetapkan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada akhir tahun 2024
2. Meningkatnya tata Kelola manajemen BBTCLPP Yogyakarta, dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi sebesar 80,58 pada akhir tahun 2024

Mempertimbangkan pencapaian hasil, perubahan arah kebijakan prioritas nasional, prioritas program, kebijakan anggaran dan upaya penajaman indikator yang *specific, measurable, achievable, dan time bound* (SMART indikator), BBTCLPP Yogyakarta telah 2 kali menetapkan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja pertama kali dilakukan pada 28 November 2019 yang masih mengacu kepada Renstra Teknokratik Kemenkes dengan target capaian sebagai berikut:

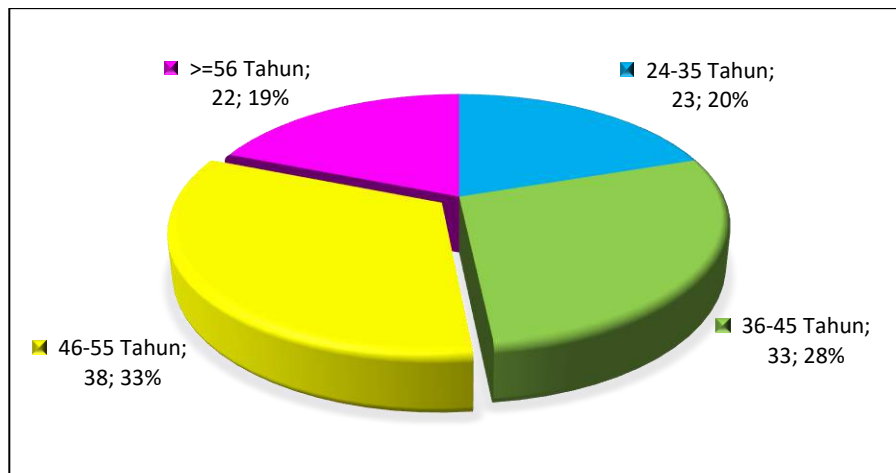
1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 87 rekomendasi pada tahun 2024
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 46% pada tahun 2024
3. Respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 100% pada tahun 2024
4. Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan sebanyak 16 jenis pada tahun 2024
5. Nilai kinerja anggaran sebesar 90 pada tahun 2024
6. Nilai indikator pelaksanaan anggaran sebesar 80 pada tahun 2024
7. Kinerja implementasi satker WBK sebesar 80 pada tahun 2024
8. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 84% pada tahun 2024

Dengan terbitnya Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, perubahan kebijakan perencanaan, termasuk redesain anggaran pada tahun 2020 untuk tahun 2021, serta munculnya isu strategis baru (khususnya pandemi COVID-19), maka mau tidak mau, harus dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

RAK. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah indikator dan target kinerja dalam dokumen RAK Revisi-1 terTanggal 28 September 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 76 rekomendasi pada tahun 2024
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 100% pada tahun 2024
3. Respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 90% pada tahun 2024
4. Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan sebanyak 16 jenis pada tahun 2024
5. Nilai kinerja anggaran sebesar 95 pada tahun 2024
6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 90% pada tahun 2024
7. Kinerja implementasi satker WBK sebesar 81 pada tahun 2024
8. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80% pada tahun 2024

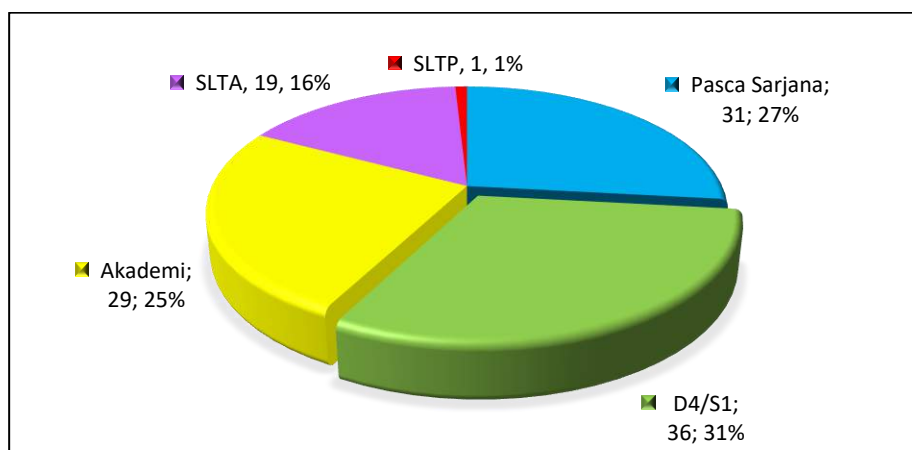
Dalam pencapaian kinerjanya, BBTCLPP Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Jumlah SDM per Tanggal 1 Januari 2020 seluruhnya 116 orang. Situasi ketenagaan ini dapat dikelompokkan menurut golongan umur sebagai berikut:



Gambar 1. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur per 1 Januari 2020

Dari Gambar 1 terlihat bahwa kelompok paling besar pegawai di BBTCLPP Yogyakarta berada pada kelompok umur 46-55 tahun yang menurut Kementerian Kesehatan masuk dalam kelompok umur Lansia Awal, disusul pegawai kelompok dewasa akhir (36-45 tahun).

Pengelompokan pegawai BBTCLPP Yogyakarta berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

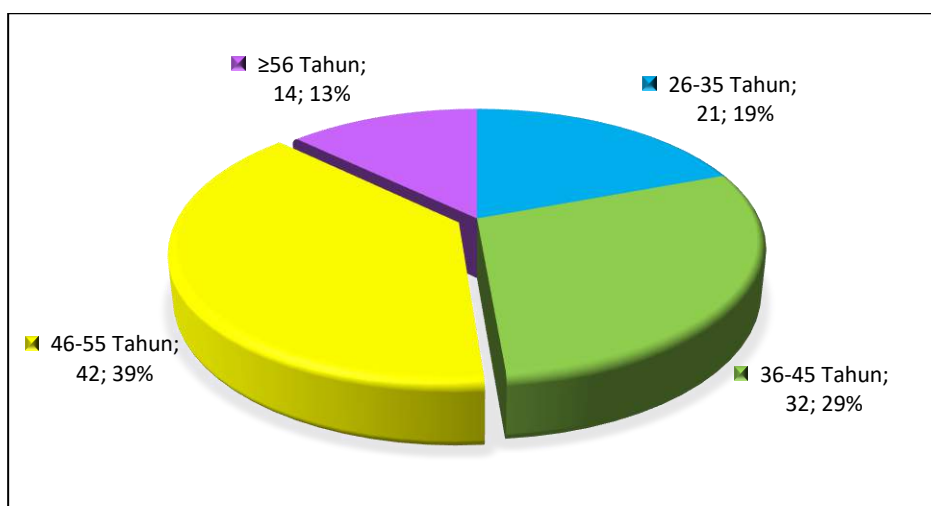


Gambar 2. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2020

Dari Gambar 2 terlihat bahwa kelompok terbanyak pegawai di BBTCLPP Yogyakarta pada awal tahun 2019 adalah berpendidikan D4/Sarjana (S1), disusul Pasca Sarjana, namun masih ada 1 pegawai yang berpendidikan SLTP/Sederajat.

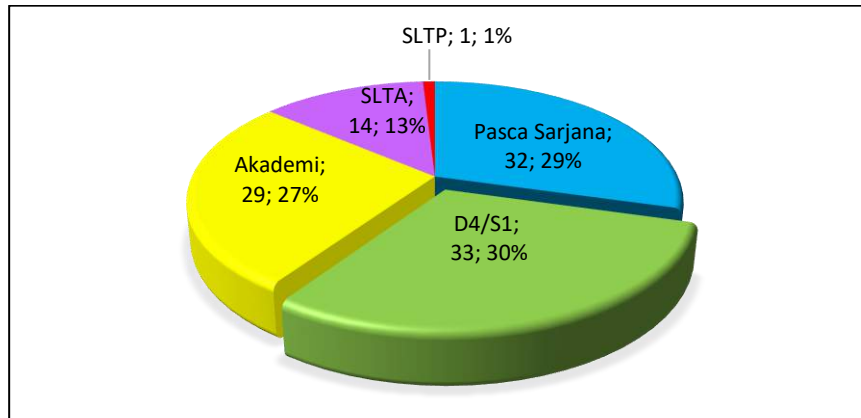
Jumlah SDM ini berkurang pada akhir tahun 2020 karena 9 orang pensiun. Dengan demikian, jumlah total SDM berjumlah 109 orang.

Distribusi SDM berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur per 31 Desember 2020

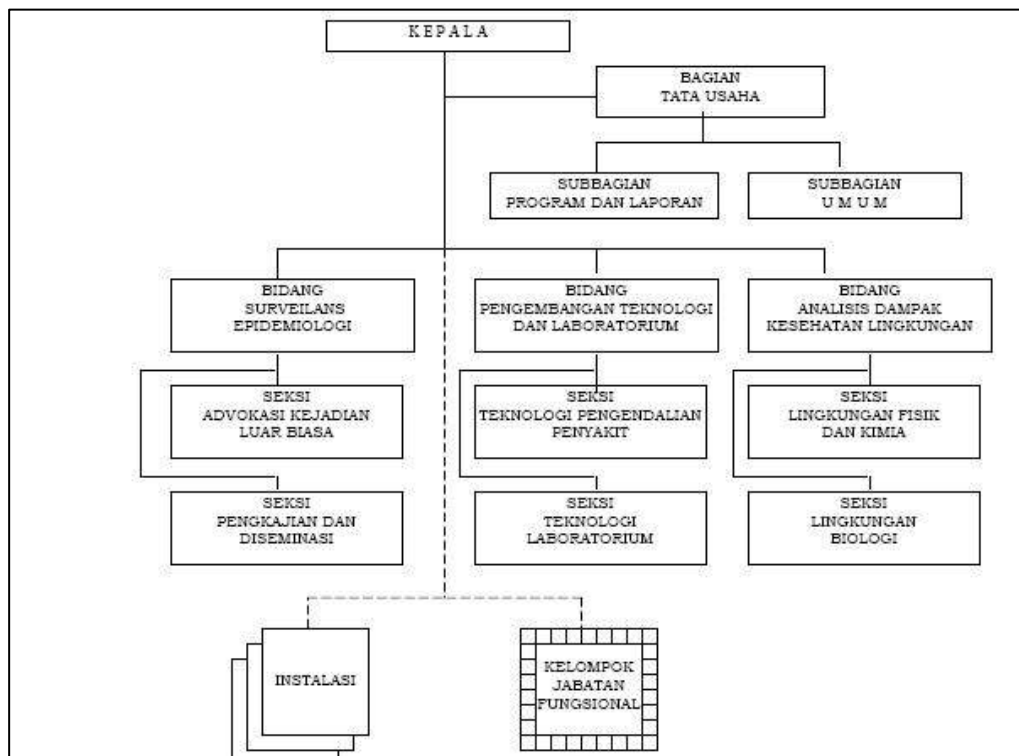
Dari Gambar 3 terlihat bahwa per 31 Desember 2020, kelompok paling besar pegawai di BBTCLPP Yogyakarta berada pada kelompok umur 46-55 tahun yang menurut Kementerian Kesehatan masuk dalam kelompok umur Lansia Awal, disusul pegawai kelompok dewasa akhir (36-45 tahun). Pola ini sama dengan pola pada awal tahun 2020. Pengelompokan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Proporsi Pegawai BBTCLPP Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020

Dari Gambar 4 terlihat bahwa kelompok terbanyak pegawai di BBTCLPP Yogyakarta pada akhir tahun 2020 adalah berpendidikan D4/Sarjana (S1), disusul Pasca Sarjana, namun masih ada 1 pegawai yang berpendidikan SLTP/Sederajat. Pola ini mengalami pergeseran dari awal tahun 2020 dengan adanya pegawai berpendidikan S2 yang pensiun.

BBTCLPP Yogyakarta menjalankan tugas dan fungsinya melalui sebuah struktur sesuai bagan organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Bagan Organisasi BBTCLPP menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Arah pembangunan kesehatan jangka menengah kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Arah ini selanjutnya dirumuskan dalam rencana kinerja Ditjen P2P yang kemudian dijabarkan BBTCLPP Yogyakarta dalam rencana kinerjanya dengan konsep surveilans berbasis laboratorium sejalan dengan lingkup tugas dan fungsi BBTCLPP sesuai Permenkes Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, BBTCLPP Yogyakarta telah menetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2024.

Dengan pertimbangan pencapaian hasil, perubahan arah kebijakan prioritas nasional, prioritas program, kebijakan anggaran dan upaya penajaman indikator (SMART indikator), maka disusun indikator kinerja dan target capaiannya. Target dan indikator kinerja ini terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

Dalam RAK awal yang terbit Tanggal 28 November 2019, target kinerja tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Awal
BBTKLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 rekomendasi	87 rekomendasi	87 rekomendasi	87 rekomendasi	87 rekomendasi
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	25%	30%	35%	40%	45%
3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	8 jenis	10 jenis	12 jenis	14 jenis	16 jenis
5. Nilai kinerja anggaran	80	80	80	80	80
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90
7. Kinerja implementasi satker WBK	70	75	80	80	80
8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	81%	82%	83%	84%

Berdasarkan rewiu terhadap RAK awal, maka dilakukan revisi RAK. Dalam dokumen RAK revisi yang terbit Tanggal 28 September 2020 ini, terdapat perubahan terhadap beberapa target dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Revisi-1
BBTKLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 rekomendasi	70 rekomendasi	72 rekomendasi	74 rekomendasi	76 rekomendasi
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	25%	50%	60%	90%	100%
3. Respon Sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	90%	95%	100%	100%	100%
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	8 jenis	10 jenis	12 jenis	14 jenis	16 jenis
5. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	88	95
6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	82%	85%	88%	90%
7. Kinerja implementasi satker WBK	70	80	80	80	81
8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	80%	80%	80%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) BBTCLPP Yogyakarta merupakan dokumen yang memperjanjikan rencana kinerja Kepala BBTCLPP Yogyakarta kepada Direktur Jenderal P2P untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran BBTCLPP Yogyakarta pada periode satu tahun. PK BBTCLPP Yogyakarta disusun berdasarkan target kinerja yang

tercantum pada dokumen Rencana Aksi Kegiatan BBTCLPP Yogyakarta tahun 2020-2024. Penyusunan dan penandatanganan PK awal BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020 dilakukan pada bulan Desember 2020, yaitu setelah terbit DIPA dan RKA-KL BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020, kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan pada awal tahun 2020. Target-target kinerja sasaran yang akan dicapai BBTCLPP Yogyakarta tercantum dalam dokumen PK. Selama tahun 2020, terdapat 3 kali revisi PK; yang terakhir pada triwulan ketiga (9 November) tahun 2020. Revisi ke-3 dan penandatanganan PK dilakukan sehubungan terjadi perubahan pagu anggaran berupa penambahan pagu untuk mencukupi kebutuhan penanganan COVID-19, sehingga dilakukan pula revisi terhadap target kinerja. Matriks PK revisi-3 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Perjanjian Kinerja Revisi-3 BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 rekomendasi
2.	Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	25%
3.	Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90%
4.	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	11 jenis
5.	Nilai kinerja anggaran	80
6.	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
7.	Kinerja implementasi satker WBK	70
8.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

Pada PK revisi-3 BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020, dialokasikan anggaran sebesar Rp38.877.107.000,-

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Revisi BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran BBTCLPP Yogyakarta adalah “Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans factor risiko dan penyakit berbasis laboratorium pada akhir tahun 2024”. Sasaran ini merupakan sasaran yang tercantum dalam Renstra/RAP yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Yogyakarta dan perubahan nomenklatur berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015.

Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan Matrik Rencana Aksi Kegiatan Revisi-1 BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TARGET	REALISASI CAPAIAN 2020	REALISASI CAPAIAN 2019	PERSEN TASE CAPAIAN 2020 (%)	PERSEN TASE CAPAIAN 2019 (%)	-/+
1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 rekomendasi	157	97	180,46	112,79	+67,67
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	25%	32,48%	N/A	129,94	N/A	N/A
3. Respon Sinyal KLB/ Bencana kurang dari 24 jam	90%	100%	100%	111,11	100	+11,11
4. Jumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan	11 jenis	11 jenis	13 jenis	100	130	-30
5. Nilai kinerja anggaran	80	94,92	87,82	118,65	109,78	+8,87
6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	100%	N/A	125	N/A	N/A
7. Kinerja implementasi satker WBK	70	87,53	83,75	125,04	119,64	+5,4
8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	79,82%	N/A	177,37	N/A	N/A
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN				133,45	114,44	+19,00

*) Target 2019 → SKK: 33 rekomendasi; P2TVZ: 47 rekomendasi; P2ML: 6 rekomendasi
 Realisasi 2019 → SKK: 38 rekomendasi; P2TVZ: 53 rekomendasi; P2ML: 6 rekomendasi

Dari tabel di atas, terlihat ada 8 indikator yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020. Bila dibandingkan, dari 8 indikator yang ditetapkan untuk tahun 2020, hanya 5 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator tahun 2019, yaitu indikator yang

setara dan ada datanya, sedangkan 3 indikator lain tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru muncul pada tahun 2020.

Dari 8 indikator pada tahun 2020, seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, bahkan 7 dari antaranya tercapai melebihi target. Rata-rata persentase capaian kinerja organisasi pada tahun 2020 adalah **133,45%**. Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian 5 indikator kinerja yang dapat diperbandingkan antara tahun 2020 dan tahun 2019, maka rata-rata capaian kinerja tahun 2020 naik 19 poin dibanding rata-rata capaian tahun 2019.

Analisis capaian kinerja masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan**

Definisi Operasional

Kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian, dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP.

Cara Perhitungan

Jumlah kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP selama 1 (satu) tahun

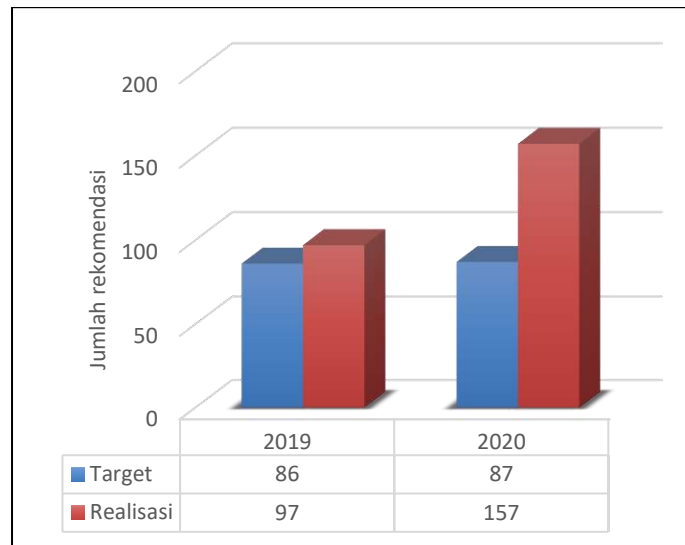
Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah 157 rekomendasi dari target 87 rekomendasi, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 180,46%, dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{157 \text{ rekomendasi}}{87 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 180,46\%$$

Target dan capaian indikator pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2019. Indikator ini dapat dibandingkan melalui perhitungan dengan cara menggabungkan total jumlah rekomendasi pada 3 indikator sejenis dari yang dikelompokkan atas kegiatan SKK, PPTVZ, dan P2ML, sedangkan pada tahun 2020, untuk capaian indikator sudah merupakan penggabungan dari kegiatan SKK, PPTVZ, dan P2ML.

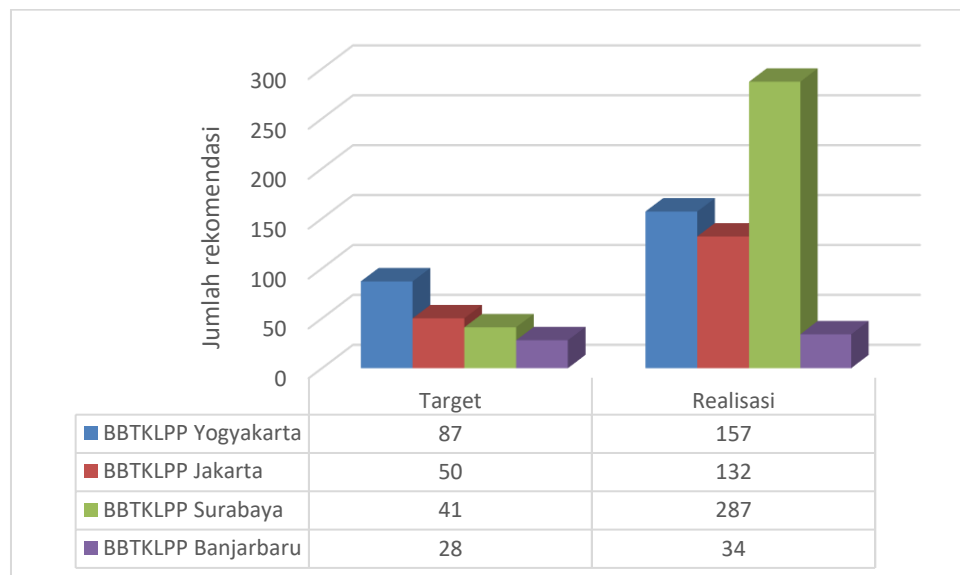
Perbandingan realisasi capaian indikator ini terlihat pada grafik berikut:



Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi untuk Indikator "Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan" BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 sudah melebihi target, yaitu sebesar 157 rekomendasi dari target 87 rekomendasi. Jika dibandingkan, pencapaian indikator kinerja tahun 2020 lebih tinggi dibanding tahun 2019.

Realisasi capaian terhadap target indikator ini bila dibandingkan dengan BBTCLPP lain terlihat seperti Gambar berikut:



Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator "Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan" Tahun 2020

Dari Gambar 7 terlihat bahwa keempat BBTCLPP menetapkan target yang berbeda. BBTCLPP Yogyakarta menetapkan target paling tinggi, yaitu 87

rekomendasi, disusul BBTCLPP Jakarta (50 rekomendasi), BBTCLPP Surabaya (41), dan BBTCLPP Banjarbaru (28 rekomendasi). Penetapan target yang berbeda dimungkinkan mengingat luas dan perbedaan kondisi wilayah layanan maupun ketersediaan sumber daya pada masing-masing Balai Besar. Keempat BBTCLPP mencapai kinerja melebihi target, yang mana BBTCLPP Surabaya mencapai kinerja tertinggi, yaitu 287 rekomendasi (dengan 79 Kabupaten/Kota wilayah layanan), disusul BBTCLPP Yogyakarta, yaitu 157 rekomendasi (dengan 40 Kabupaten/Kota wilayah layanan).

Pada tahun 2020, target ini terpenuhi dengan melaksanakan kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium dengan hasil sebanyak 156 rekomendasi (180,46%). Kegiatan yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pertemuan Dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama LP LS Dalam Penanggulangan KLB
2. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD dr R. Goeteng Taroenadibrata
3. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD dr. Soegiran Wonogiri
4. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Respira
5. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Panti Rapih
6. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Temanggung
7. Penanganan PDP COVID-19 di RS PKU Muhammadiyah Bantul
8. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Dr. Soeselo
9. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Wongso Negoro
10. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD KRT Setjonegoro
11. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Hj Anna Lasmanah
12. Penanganan PDP COVID-19 di PKU Muhammadiyah Gombong Kebumen
13. Penanganan PDP COVID-19 di PKU Muhammadiyah Sruweng Kebumen
14. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Brebes
15. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Elizabeth Bantul
16. Penanganan PDP COVID-19 di RS Hardjolukito Bantul
17. Penanganan PDP COVID-19 di RS DKT Kotabaru Yogyakarta
18. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Purworejo
19. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Ambarawa
20. Penanganan PDP COVID-19 di RSJ dr. Soerojo
21. Penanganan PDP COVID-19 di RS Indriati
22. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Sukoharjo
23. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Blora
24. Penanganan PDP COVID-19 di RS Hermina Kota Surakarta

25. Penanganan PDP COVID-19 di RS Pantj Rini Sleman
26. Penanganan PDP COVID-19 di RS Bethesda Lempuyangwangi
27. Pemeriksaan RDT Pegawai BBTCLPP Yogyakarta
28. Pemeriksaan RDT Pegawai Kejati DIY
29. Penanganan PDP COVID-19 di RSLKC Bambanglipuro
30. Penanganan PDP COVID-19 di Puskesmas Banguntapan 1
31. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Kardinah Kota Tegal
32. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Moewardi Kota Surakarta
33. Kontak Tracing kasus positif di Kota Yogyakarta (RSUD Wirosaban)
34. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD dr. Soeraji Klaten
35. Penanganan PDP COVID-19 di RS Bethesda
36. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Cilacap
37. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Prembun Kebumen
38. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Sudirman Kebumen
39. Penanganan PDP COVID-19 di RS Wijayakusuma Banyumas
40. Contact Tracing Kasus Positif COVID-19 pada Cluster Penjual Ikan di Kabupaten Gunungkidul DIY
41. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul
42. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen
43. Verifikasi Rumor di Kota Yogyakarta
44. Verifikasi Rumor di Kabupaten Bantul
45. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 4-5 Agustus
46. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 4-5 Agustus
47. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 6-7 Agustus
48. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 14 Agustus
49. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul
50. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten
51. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo
52. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Magelang
53. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Wonosari Tanggal 4-5 Agustus 2020
54. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 24 Agustus 2020
55. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul Tanggal 25 Agustus 2020

56. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 28 Agustus 2020
57. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 8 September 2020
58. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Magelang Tanggal 9 September 2020
59. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 11/09/20
60. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Magelang Tanggal 15 September 2020
61. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 15 September 2020
62. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga Tanggal 17-18 September 2020
63. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 18 September 2020
64. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 1 September 2020
65. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 11 September 2020
66. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 6 Oktober 2020
67. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali Tanggal 8 September 2020
68. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali Tanggal 11 September 2020
69. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 7 September 2020
70. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 15 September 2020
71. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 18 September 2020
72. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 25 Agustus 2020
73. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 4 September 2020
74. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang 16 September 2020
75. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 5 Oktober 2020

76. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 19 Agustus 2020
77. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 25 Agustus 2020
78. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 27 Agustus 2020
79. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga Tanggal 3-4 September 2020
80. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 7 September 2020
81. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 2 September 2020
82. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas Tanggal 16-17 September 2020
83. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 9 Oktober 2020
84. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas Tanggal 9-10 September 2020
85. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 8 Oktober 2020
86. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta Tanggal 9 Oktober 2020
87. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 10 September 2020
88. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 28 Agustus 2020
89. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 27 Agustus 2020
90. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 18 September 2020
91. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 26 Agustus 2020
92. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta Tanggal 14 Oktober 2020
93. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 26 Agustus 2020
94. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 22 September 2020
95. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 5 Oktober 2020

96. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 15 Oktober 2020
97. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 24 Agustus 2020
98. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 28 Agustus 2020
99. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta Tanggal 12 Oktober 2020
100. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 1 September 2020
101. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 23 September 2020
102. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 24 Agustus 2020
103. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 18 September 2020
104. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 19 Agustus 2020
105. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 8 Oktober 2020
106. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 25 Agustus 2020
107. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 21 September 2020
108. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 23 September 2020
109. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang Tanggal 22-24 Oktober 2020
110. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung Tanggal 12 November 2020
111. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 17 September 2020
112. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 10 September 2020"
113. 1. Pemetaan Luas Daerah Reseptifitas malaria di Kabupaten Purworejo
114. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul DIY
115. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

116. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Bantul DIY
117. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah
118. Surveilans Penyakit Zoonosis PES di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY
119. Surveilans Penyakit Zoonosis PES di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
120. Surveilans Penyakit Zoonosis PES di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
121. Surveilans Penyakit Zoonosis PES Sylvatik di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY
122. Surveilans Penyakit Zoonosis PES Sylvatik di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
123. Surveilans Penyakit Zoonosis PES Sylvatik di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
124. Kajian Penemuan Kasus TB Baru, Pemantuan Pengobatan dan Gambaran Faktor Risiko Kejadian TB di Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
125. Surveilans Penemuan Kasus TB Baru dan Pemantauan Pengobatan di Pondok Pesantren di Kabupaten. Kendal Provinsi Jawa Tengah.
126. Gambaran Faktor Risiko Kejadian TB di Pondok Pesantren di Kabupaten. Kendal Prov. Jawa Tengah."
127. Identifikasi Risiko dan Dampak Kejadian Khusus Terhadap Masyarakat Sekitar (Identifikasi FR Antraks di Kabupaten Gunung Kidul)
128. Identifikasi risiko dan dampak kejadian khusus terhadap masyarakat sekitar (Pencemaran limbah batk di Kulon progo)
129. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Minum Semester 1 Tahun 2020 DIY
130. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Minum Semester 1 Tahun 2020 Jawa Tengah
131. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Bersih Semester 1 Tahun 2020 DIY
132. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Bersih Semester 1 Tahun 2020 Jawa Tengah
133. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Minum Semester 2 Tahun 2020 DIY
134. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Minum Semester 2 Tahun 2020 Jawa Tengah
135. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Bersih Semester 2 Tahun 2020 DIY
136. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Bersih Semester 2 Tahun 2020 Jawa Tengah
137. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Limbah Semester 2 tahun 2020 DIY

138. Analisis Data Laboratorium Sampel Air Limbah Semester 2 tahun 2020 Jawa Tengah
139. Surveilans FR Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah Kabupaten Wonogiri
140. Surveilans FR Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah Kabupaten Kulon Progo
141. Laporan Surveilans Sentinel JE(S3JE) di DIY
142. Laporan Surveilans Sentinel JE (S3JE) di Provinsi Jawa Tengah
143. Surveilans Perilaku Vektor dan Konfirmasi Vektor di Kota Semarang
144. Surveilans Perilaku Vektor dan Konfirmasi Vektor di Kabupaten Grobogan
145. Laporan Surveilans Sentinel Dengue (S3D) di Kota Semarang
146. Laporan Surveilans Sentinel Dengue (S3D) di Kabupaten Gunung Kidul
147. Laporan Surveilans Sentinel Dengue (S3D di Kabupaten Grobogan"
148. Surveilans Faktor Resiko Rabies di Sukoharjo
149. Pengembangan Pengujian Mercury Dalam Air
150. Assesment Akreditasi Laboratorium Penguji dan Kalibrasi
151. Uji profisiensi/banding (Akreditasi Laboratorium)
152. Pengambilan, Pengiriman, dan Pengembalian Spesimen Carrier Sampel Surveilans Lingkungan dalam Mendukung ERAPO di DIY
153. Pengambilan, Pengiriman, dan Pengembalian Spesimen Carrier Sampel Surveilans Lingkungan dalam Mendukung ERAPO di Jawa Tengah
154. Pengembangan Pemeriksaan COVID-19
155. Rekomendasi pengelolaan kualitas air di wisata air klaten
156. Rekomendasi Kegiatan Pemanfaatan TTG Untuk Faktor Risiko Pencemaran dan Bencana Pada Kasus Limbah Batik Banyu Sabrang Di Gulurejo Lendah Kabupaten Kulonprogo
157. Rekomendasi perlakuan TTG pada kualitas air dengan parameter TDS, Nitrat, Nitrit, Fe, dan Kesadahan Tinggi di Kabupaten Semarang

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. Man

Sumber daya ini merupakan SDM yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan surveilans/kajian faktor risiko penyakit berbasis laboratorium pengembangan pengujian, kendali mutu laboratorium, dan sebagainya. Sebagai laboratorium penguji dan kalibrasi serta tambahan penugasan sebagai laboratorium pemeriksa sampel COVID-19 di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah, maka SDM yang terbatas jumlahnya harus betul-betul diatur

penugasannya demi kelancaran pemeriksaan sampel COVID-19 yang cukup banyak jumlahnya serta menuntut hasil yang cepat dan akurat. Di samping pemeriksaan COVID-19, pelayanan pemeriksaan sampel di luar COVID-19, terutama UKL-UPL, harus juga tetap berjalan. Untuk itu, dilakukan pengaturan jadwal melalui sistem *shift* dengan memberdayakan personil laboratorium yang sudah ada. Ini merupakan salah satu bentuk sebagai bentuk efisiensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja.

Efisiensi SDM juga dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan di Bidang Bagian, untuk memastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten.

2. *Machines*

Sharing peralatan laboratorium, salah satunya PCR, yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan sampel untuk pelayanan pelanggan dan mendukung kegiatan surveilans/kajian, ditingkatkan pemanfaatannya untuk pemeriksaan sampel COVID-19 melalui pengaturan jadwal penggunaan. Pemanfaatan Laboratorium BSL II dengan yang dioptimalkan *full* 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, juga merupakan bentuk efisien pemanfaatan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja ini

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 180,46% ini adalah Rp12.326.439.000, namun yang digunakan sebesar Rp12.181.859.862 atau 98,83% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp12.326.439.000; RAKi = Rp12.181.859.862; CKi = 180,46% (1,81), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

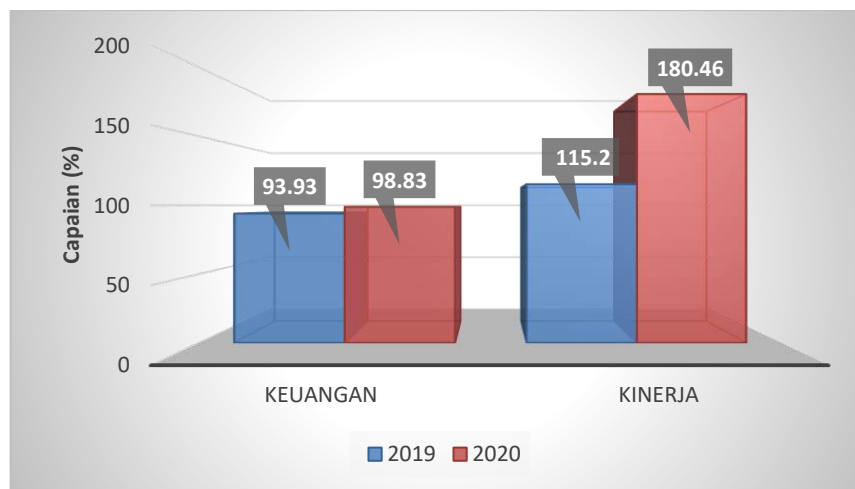
$$\text{Efisiensi} = \frac{(12.326.439.000 \times 1,81) - 12.181.859.862}{(12.326.439.000 \times 1,81)} \times 100\%$$

$$= \frac{10.128.994.728}{22.310.854.590} \times 100\%$$

$$= 45,40\%$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 45,40%.

Perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja tahun 2020 dan 2019 terlihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator "Jumlah Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan" Tahun 2020

Dari Gambar di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran dan kinerja meningkat pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

4. Method

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan penyesuaian cara pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan. Contohnya adalah pertemuan-pertemuan atau sejenisnya yang semula diselenggarakan dengan tatap muka, tahun 2020 dilakukan secara virtual menggunakan platform Zoom Meeting/Google Meet, atau sejenisnya.

Dalam dokumen perencanaan, awalnya kegiatan yang dilaksanakan terutama kegiatan yang sudah dialokasikan dalam POK, namun dengan terjadinya COVID-19, banyak kegiatan yang ditunda/dibatalkan karena prioritas kegiatan untuk penanganan COVID-19. Untuk itu, kegiatan yang ditunda/dibatalkan kemudian dialihkan untuk menghasilkan rekomendasi dari surveilans/kajian terkait COVID-19.

5. *Materials*

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan bahan-bahan, antara lain reagen dan bahan habis pakai lainnya. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, terjadi pula peningkatan kebutuhan bahan-bahan tersebut, sementara anggaran terbatas. Untuk itu, efisiensi yang dilakukan adalah dengan menerima maupun mengajukan permohonan bantuan Reagen dan Alat/Bahan Habis Pakai, khususnya untuk penanganan dan pemeriksaan COVID-19 baik dari Kemenkes, BNPB, dan beberapa lembaga yang menawarkan bantuan untuk membantu keberlangsungan penanganan dan pemeriksaan sampel COVID-19, di samping pula mengandalkan penyediaan bahan melalui pengadaan dengan anggaran yang direalokasi dalam dokumen anggaran Satker sendiri.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini karena beberapa hal berikut:

- Tersedianya data-data penanganan COVID-19 untuk dijadikan bahan kajian/surveilans yang menghasilkan rekomendasi ke stakeholders
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan/Instansi terkait di Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan di wilayah kerja, baik secara daring maupun luring;
- Ketersediaan Laboratorium BSL II berikut alat/bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan sampel COVID-19
- Ada bantuan-bantuan baik alat maupun anggaran dari Pusat, BNPB, maupun sumber lain yang sah

Hambatan dan solusi

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah terjadinya dampak COVID-19 sehingga beberapa kegiatan surveilans dan/atau kajian faktor risiko mengalami perubahan teknis pelaksanaan.

Solusi dari hambatan ini dilakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodir kebutuhan teknis di lapangan melalui beberapa kali revisi anggaran.

Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) internal maupun revisi DIPA ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta maupun Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai peraturan yang berlaku.

2. Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang dilaksanakan

Definisi Operasional

Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko

penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang dilaksanakan/dimanfaatkan oleh internal B/BTKLPP dan/atau stakeholder eksternal terkait.

Cara Perhitungan:

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP pada tahun tertentu yang dilaksanakan/dimanfaatkan oleh internal B/BTKLPP dan/atau minimal oleh 1 stakeholder eksternal terkait ditahun yang sama

B = Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP ditahun tertentu yang disampaikan kepada stakeholder terkait

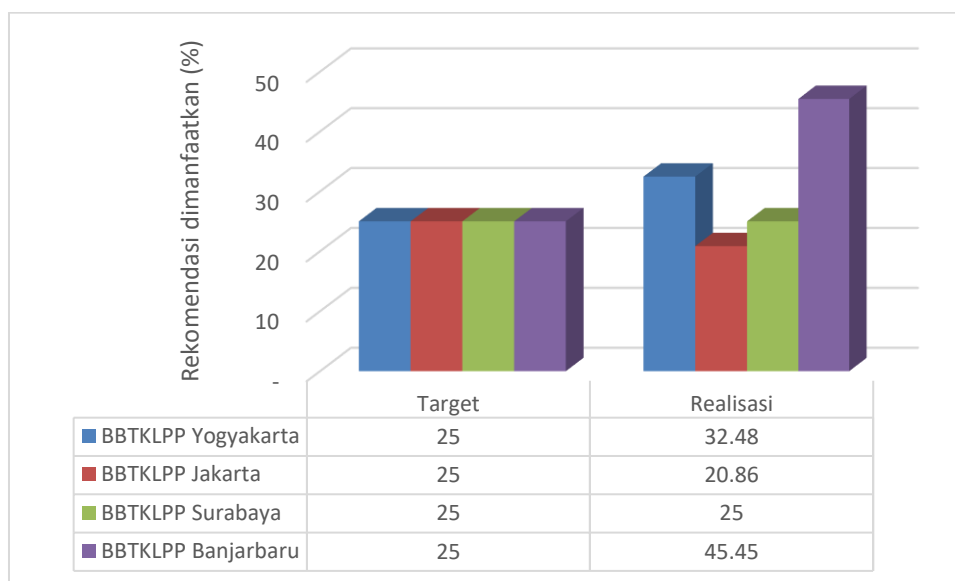
Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 32,48% dari target 25%, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 129,94% dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{32,48\%}{25\%} \times 100\% = 129,94\%$$

Realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah digunakan sebagai indikator penilaian satker.

Realisasi capaian terhadap target indikator ini bila dibandingkan dengan BBTCLPP lain terlihat seperti Gambar berikut:



Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Rekomendasi Surveilans Faktor Risiko dan Penyakit Berbasis Laboratorium yang Dilaksanakan” Tahun 2020

Dari Gambar 9 terlihat bahwa keempat BBTCLPP menetapkan target yang sama untuk indikator ini, yaitu 25%. Dari empat BBTCLPP, terdapat 1 BBTCLPP yang tidak mencapai target, yaitu BBTCLPP Jakarta; 1 BBTCLPP mencapai target persis sama dengan target, yaitu BBTCLPP Surabaya; 2 BBTCLPP mencapai target di atas yang ditetapkan, yaitu BBTCLPP Banjarbaru dan BBTCLPP Yogyakarta. BBTCLPP Banjarbaru mencapai realisasi tertinggi, yaitu 45,45%.

Indikator ini *cascaded* dengan indikator dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024, sehingga dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan target nasional sebagaimana dalam Renstra 2020-2024 Kemenkes sebesar 80% pada 2020, dengan realisasi kinerja BBTCLPP Yogyakarta sebesar 32,48%, maka kinerja ini belum tercapai.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2020-2024 maka capaian s.d. akhir tahun 2020 sebesar 58,62% ini telah mencapai percepatan target sampai dengan akhir tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 40%. Sedang jika dibandingkan dengan target 60% di tahun 2022 maka percepatan pencapaian target telah mencapai sebesar 97,7%. Sampai akhir tahun 2024 progress kinerja telah mencapai 58.62% untuk mencapai 100% capaian di akhir tahun 2024.

Bila dibandingkan dengan Standar Nasional sebagaimana dalam Renstra 2020-2024 Kemenkes sebesar 80% pada 2020, dengan realisasi kinerja sebesar 58,62%,

maka kinerja ini belum tercapai. Sampai akhir tahun 2024 progress kinerja telah mencapai 58,62% untuk mencapai 100% capaian pada akhir tahun 2024.

Target ini terpenuhi melalui pelaksanaan tindak lanjut/pemanfaatan terhadap 51 dari 157 rekomendasi (32,48%) yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan BBTCLPP Yogyakarta selama tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pertemuan LP/LS Dalam Penanggulangan Antraks di Kabupaten Gunung Kidul
2. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul
3. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul
4. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo
5. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 3 September 2020
6. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 14 Agustus 2020
7. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 4 September 2020
8. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 21 September 2020
9. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 24 Agustus"2020
10. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Respira
11. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Panti Rapih
12. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD Temanggung
13. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Dr. Soeselo
14. Penanganan PDP COVID-19 di RS Panti Rini Sleman
15. Penanganan PDP COVID-19 di RS. Kardinah Kota Tegal
16. Penanganan PDP COVID-19 di RSUD dr. Soeraji Klaten
17. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 1 September 2020
18. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 11 September 2020
19. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 6 Oktober 2020
20. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali Tanggal 8 September 2020
21. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali Tanggal 11 September 2020
22. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 7 September 2020
23. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 15 September 2020
24. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 18 September 2020

25. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 25 Agustus 2020
26. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 4 September 2020
27. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 8 September 2020
28. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 18 September 2020
29. Pemetaan Luas Daerah Reseptifitas Malaria di Kabupaten Purworejo
30. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul DIY
31. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
32. Kajian Uji Sensitivitas dan Spesifitas Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 di Kabupaten Bantul DIY
33. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
34. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes Sylvatik di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
35. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
36. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes Sylvatik di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
37. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY
38. Surveilans Penyakit Zoonosis Pes Sylvatik di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY
39. Tindaklanjut Rekomendasi Kegiatan Identifikasi Risiko dan Dampak Kejadian Khusus Terhadap Masyarakat Sekitar Kasus Antraks di Kabupaten Gunung Kidul
40. Tindaklanjut Rekomendasi Kegiatan Identifikasi Risiko dan Dampak Kejadian Khusus Terhadap Masyarakat Sekitar Kasus Pencemaran Batik di Kabupaten Kulonpogo
41. Tindaklanjut Rekomendasi Kegiatan Surveilans FR Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah Kabupaten Kulonprogo
42. Tindaklanjut Rekomendasi Kegiatan Surveilans FR Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah Kabupaten Wonogiri
43. Rekomendasi Kegiatan Surveilans Perilaku Vektor dan Konfirmasi Vektor DBD di Kota Semarang
44. Rekomendasi Kegiatan S3JE di Provinsi Jawa Tengah (RSUP dr. Kariadi)
45. Rekomendasi Kegiatan Surveilans Perilaku Vektor dan Konfirmasi Vektor DBD di Kabupaten Grobogan
46. Rekomendasi kegiatan S3D di Kota Semarang
47. Rekomendasi kegiatan S3D di Kabupaten Grobogan

48. Surveilans Faktor Risiko Rabies di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Bagi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
49. Uji Profisiensi
50. Pengembangan Metode Merkuri
51. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Batik di Banyusabrang, Kulonprogo

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

Efisiensi SDM dilakukan dengan memberdayakan tim surveilans/kajian untuk memantau tindak lanjut/pemanfaatan rekomendasi oleh *stakeholders* terkait. Tim ini terlebih dahulu dilakukan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan. Dengan adanya SK, dapat diastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan utamanya serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten.

2. *Machines*

Dalam pelaksanaan tindak lanjut atau pemanfaatan rekomendasi hasil surveilans/kajian faktor risiko, sumber daya dapat diefisiensi melalui pemanfaatan berupa sarana prasarana yang dimiliki *stakeholders* terkait. Sebagai contoh, untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi berupa pertemuan LP/LS oleh salah satu SKPD, maka digunakan sarana prasarana SKPD tersebut, antara lain ruang pertemuan berikut perlengkapan yang ada di dalamnya tanpa perlu menyewa. Kegiatan yang dilakukan saat masa pandemi dilakukan sesuai protokol kesehatan

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 100% ini adalah Rp21.990.000, namun yang digunakan sebesar Rp21.446.500; atau 97,51% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp21.990.000; RAKi = Rp21.446.500; CKi = 129,94% (1,3), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{((21.990.000 \times 1,3) - 21.446.500)}{(21.990.000 \times 1,3)} \times 100\% \\
 &= \frac{7.140.500}{28.587.000} \times 100\% \\
 &= 24,98\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 24,98%.

4. *Method*

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan penyesuaian cara pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan. Contohnya adalah koordinasi dilakukan melalui telepon atau WA; penyampaian bukti tindak lanjut rekomendasi disampaikan melalui surat elektronik.

5. *Materials*

Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pemanfaatan sumber daya material stakeholders sasaran. Sebagai contoh, dalam penanganan PDP COVID-19 di salah satu RS, rekomendasi yang disampaikan adalah penggunaan APD ketika melakukan pengambilan *swab*. APD ini disediakan oleh stakeholders terkait.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran di dukung beberapa hal sebagai berikut:

- Rekomendasi yang implementatif dan mampu laksana
- Pendampingan BBTKLPP Yogyakarta dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, yang terbukti memberikan motivasi kepada stakeholder dan keberhasilan yang cukup baik dalam pemanfaatan rekomendasi yang diberikan

- Rekomendasi yang disampaikan dengan metode advokasi yang tepat dan sasaran yang tepat lebih dapat memberikan keberhasilan dalam memicu stakeholder untuk memanfaatkan rekomendasi yang diberikan

Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

- keterbatasan anggaran untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan BBTCLPP Yogyakarta.
- terjadi penundaan jadwal kegiatan karena pandemi COVID-19.

Solusi yang dilakukan adalah:

- Pengalihan sebagian anggaran untuk monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi melalui proses revisi
- Mengkomunikasikan melalui WA/surat terkait pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi; jika belum ada feed back, tim BBTCLPP Yogyakarta turun ke lapangan
- Penyelenggaraan diseminasi informasi hasil kajian/rekomendasi melalui daring untuk penyampaian kepada stakeholder (seluruh Provinsi/Kab/Kota dan SKPD terkait di wilayah Jateng dan DIY).

3. Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang Dari 24 Jam

Definisi Operasional

Respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya < dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, laporan penerimaan specimen.

Cara Perhitungan

Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam berdasarkan permintaan stakeholder dibandingkan dengan jumlah laporan sinyal dalam periode satu tahun dikali 100%

Rumus :

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang direspon oleh B/BTKLPP < 24 jam dalam 1 (satu) tahun

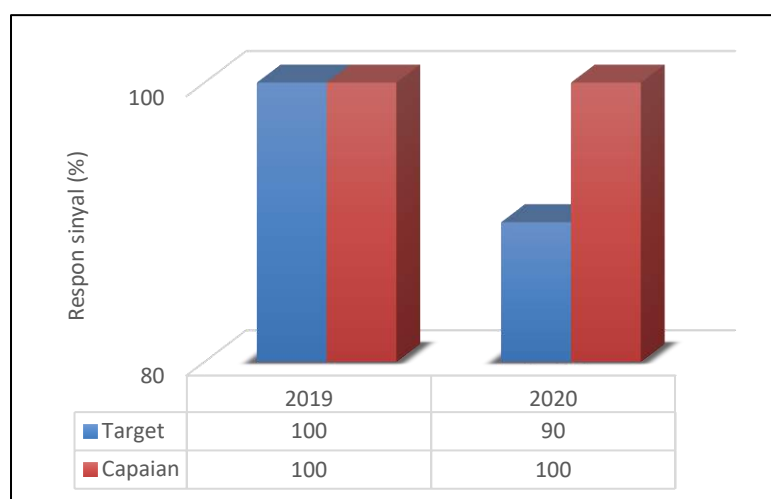
B = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang diterima oleh B/BTKLPP dalam 1 (satu) tahun

Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target 90%, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 111,11% dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

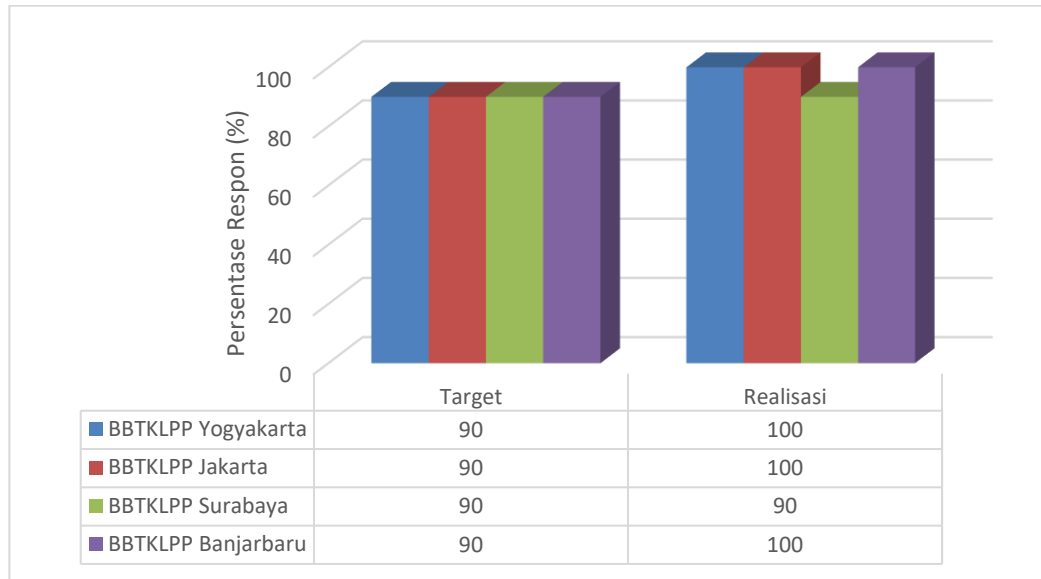
Sekalipun berbeda redaksional antara indikator tahun 2020 ini dengan indikator tahun 2019, target dan realisasi indikator ini dapat dibandingkan karena secara memiliki konsep yang sama, yaitu mengukur respon BBTCLPP Yogyakarta terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB/bencana yang mungkin akan terjadi. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui Gambar berikut:



Gambar 10. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator "Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam" Tahun 2019 dan 2020

Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sudah melebihi target, yaitu sebesar 100% dari target 90%. Jika dibandingkan, pencapaian indikator kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat penurunan target Perjanjian Kinerja terhadap indikator "Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam". Penurunan target ini merupakan penyesuaian yang dilakukan serentak untuk seluruh satker BB/BTKLPP di Indonesia sebagai dampak dari pandemik COVID-19. Namun hal ini tidak menurunkan upaya masing-masing satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan dan respon terhadap KLB yang terjadi. Hal ini terlihat bahwa pencapaian akhir rata-rata mampu mencapai 100%.

Realisasi capaian terhadap target indikator ini bila dibandingkan dengan BBTCLPP lain terlihat seperti Gambar berikut:



Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator “Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang Dari 24 Jam” Tahun 2020

Dari Gambar 8 terlihat bahwa keempat BBTCLPP menetapkan target yang sama untuk indikator ini, yaitu 90%. Seluruh BBTCLPP mencapai target indikator ini, bahkan 3 dari antaranya melebihi target dengan tercapainya 100% dan hanya 1 BBTCLPP yang mencapai realisasi persis sama dengan target (90%), yaitu BBTCLPP Surabaya.

Target ini terpenuhi melalui pelaksanaan respon terhadap 57 kejadian dari 57 kejadian yang diterima informasinya oleh BBTCLPP Yogyakarta sebagai berikut:

1. Konfirmasi Laboratorium KLB Keracunan Makanan di Desa Kroya Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
2. Respon KLB Antraks di Kabupaten Gunungkidul
3. Konfirmasi Peningkatan Kasus Hepatitis A Pada Karyawan Toserba Jadi Baru Kroya Cilacap
4. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 18 Maret 2020
5. Penanganan COVID-19 di Kota Yogyakarta Tanggal 18 Maret 2020
6. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonogiri Tanggal 19 Maret 2020
7. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga Tanggal 19-20 Maret 2020
8. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes Tanggal 21-22 Maret 2020
9. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 20 Maret 2020
10. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 20 Maret 2020
11. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Semarang Tanggal 21 Maret 2020
12. Penanganan COVID-19 di Kota Yogyakarta Tanggal 23 Maret 2020
13. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 23 Maret 2020
14. Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta Tanggal 24 Maret 2020
15. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 24 Maret 2020
16. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Blora Tanggal 26-27 Maret 2020

17. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kulonprogo Tanggal 29 Maret 2020
18. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Grobogan Tanggal 30-31 Maret 2020
19. Penyelidikan epidemiologi kasus COVID-19 di Kota Tegal Tanggal 7-8 Maret 2020
20. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kota Surakarta Tanggal 14 Maret 2020
21. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta Tanggal 4 Maret 2020
22. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 16 Maret 2020
23. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta Tanggal 16 Maret 2020
24. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal Tanggal 16-17 Maret 2020
25. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Temanggung Tanggal 17 Maret 2020
26. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta Tanggal 17 Maret 2020
27. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman Tanggal 17 Maret 2020
28. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman Tanggal 18 Maret 2020
29. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Cilacap Tanggal 18-19 Maret 2020
30. Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas Tanggal 19-20 Maret 2020
31. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang Tanggal 24-25 Maret 2020
32. OJT dan Pengambilan Sampel (PDP) di RS Hermina Kota Surakarta Tanggal 1 April 2020
33. OJT dan Pengambilan Sampel (PDP) di Kabupaten Kebumen Tanggal 2 April 2020
34. Pengambilan Sampel ODP di Kabupaten Klaten Tanggal 3 April 2020
35. Pengambilan Sampel ODP di Kabupaten Magelang Tanggal 4 April 2020
36. OJT dan Pengambilan Sampel (PDP) di RS Panti Rini Sleman Tanggal 6 April 2020
37. OJT di RS Siloam Yogyakarta Tanggal 13 April 2020
38. OJT dan Pengambilan Sampel (PDP) di RS Bethesda Lempuyangwangi Tanggal 19 April 2020
39. OJT dan Pengambilan Sampel (PDP) di RSLKC Bambanglipuro Bantul Tanggal 24 April 2020
40. Pemeriksaan RDT Pegawai Kejati di DIY Tanggal 19, 27, 28, 19 dan 30 April 2020
41. Tindak Lanjut PE Kasus Confirm ke Puskesmas Banguntapan I Tanggal 28 April 2020
42. Tracing Kontak Kasus Positif di Baturetno, Banguntapan, Bantul
43. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul

44. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen
45. Verifikasi Rumor di Kota Yogyakarta
46. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul Tanggal 4-5 Agustus 2020
47. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen Tanggal 4-5 Agustus 2020
48. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 6-7 Agustus 2020
49. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Tanggal 14 Agustus 2020
50. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul
51. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten
52. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo
53. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kota Magelang
54. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul
55. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten Tanggal 1 September 2020
56. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang Tanggal 11 September 2020
57. Penyelidikan Epidemiologi Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 6 Oktober 2020

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. Man

Sumber daya ini merupakan SDM yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan respon sinyal KLB/bencana kurang dari 24 jam. Tahun 2020, sebagian besar KLB yang direspon adalah penanganan COVID-19. Pelaksanaan respon antara lain melalui pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit berpotensi KLB/wabah, termasuk COVID-19. Tingginya beban pekerjaan laboratorium BBTCLPP Yogyakarta sebagai laboratorium pengujian dan kalibrasi serta penugasan sebagai laboratorium pemeriksa sampel COVID-19 di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah, maka SDM yang terbatas jumlahnya harus betul-betul diatur penugasannya demi kelancaran pemeriksaan sampel COVID-19 yang cukup banyak jumlahnya serta menuntut hasil yang cepat dan akurat. Di samping pemeriksaan COVID-19, pelayanan pemeriksaan sampel di luar COVID-19, terutama UKL-UPL, harus juga tetap berjalan. Untuk itu, dilakukan pengaturan jadwal melalui sistem *shift* dengan memberdayakan personil laboratorium yang sudah ada.

Efisiensi SDM juga dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan di Bidang Bagian, untuk memastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten. Salah satunya adalah penerbitan SK Kepala BBTCLPP Yogyakarta No. HK.01.02/2/17172/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Tim Verifikasi Rumor 2020.

2. *Machines*

Sharing peralatan laboratorium, salah satunya PCR, yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan sampel untuk pelayanan pelanggan dan mendukung kegiatan surveilans/kajian, ditingkatkan pemanfaatannya untuk pemeriksaan sampel COVID-19 melalui pengaturan jadwal penggunaan. Laboratorium BSL II yang berdiri tahun 2018 dan mulai operasional sejak 2019, dioptimalkan *full* 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk pemeriksaan sampel COVID-19. Pemanfaatan lobi gedung baru untuk loket pelayanan sampel COVID-19 yang terpisah dari loket pemeriksaan non COVID-19, juga merupakan bentuk efisien pemanfaatan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja ini

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 111,11% ini adalah Rp303.512.000, namun yang digunakan sebesar Rp301.938.645 atau 99,48% dari total anggaran yang tersedia. Untuk mengakomodir pelaksanaan respon sinyal KLB/bencana, dilakukan realokasi anggaran untuk pemenuhan penanggulangan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

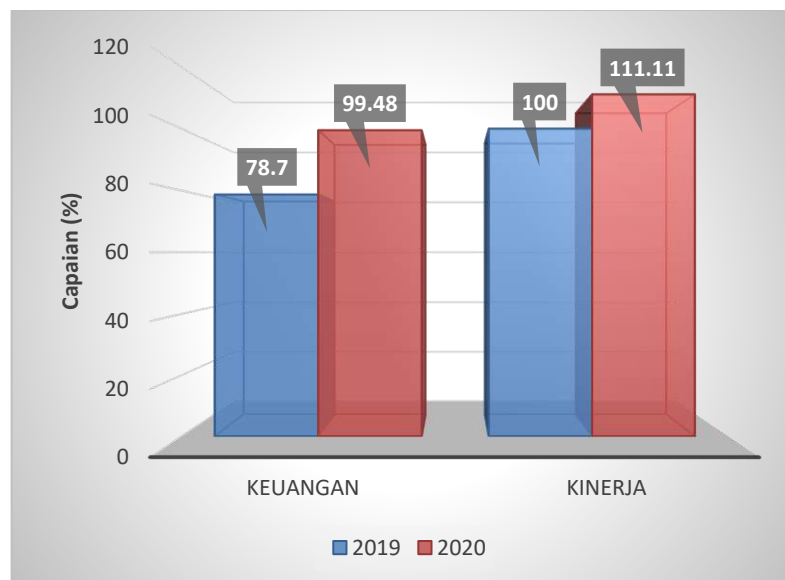
E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp303.512.000; RAKi = Rp301.938.645; CKi = 111,11% (1,11), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{(303.512.000 \times 1,11) - 301.938.645}{(303.512.000 \times 1,11)} \times 100\% \\
 &= \frac{34.959.675}{336.893.320} \times 100\% \\
 &= 10,38\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10,38%.

Perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja tahun 2020 dan 2019 terlihat pada gambar berikut:



Gambar 12. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator "Respon Sinyal KLB/Bencana Kurang dari 24 Jam" Tahun 2020

Dari Gambar di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran dan kinerja meningkat pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Capaian realisasi kinerja sedikit meningkat, sementara capaian realisasi keuangan meningkat cukup tinggi.

4. Method

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan penyesuaian cara pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan. Contohnya adalah koordinasi dilakukan melalui telepon atau WA; pertemuan-pertemuan atau sejenisnya yang sebelumnya melalui tatap muka, tahun 2020 dilakukan secara virtual menggunakan platform Zoom Meeting/Google Meet.

5. *Materials*

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan bahan-bahan, antara lain reagen dan bahan habis pakai lainnya. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, terjadi pula peningkatan kebutuhan bahan-bahan tersebut, sementara anggaran terbatas. Untuk itu, efisiensi yang dilakukan adalah dengan menerima maupun mengajukan permohonan bantuan Reagen dan Alat/Bahan Habis Pakai, khususnya untuk penanganan dan pemeriksaan COVID--19 baik dari Kemenkes, BNPB, dan beberapa lembaga yang menawarkan bantuan untuk membantu keberlangsungan penanganan dan pemeriksaan sampel COVID – 19, di samping pula mengandalkan penyediaan bahan melalui pengadaan dengan anggaran yang direalokasi dalam dokumen anggaran Satker sendiri.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran didukung beberapa hal sebagai berikut:

- Kerjasama dan upaya koordinasi cepat dengan institusi di wilayah kerja;
- Adanya strategi berupa penguatan kewaspadaan, deteksi dini, dan investigasi;
- Ketersediaan dukungan untuk respon sinyal berupa alat dan bahan laboratorium untuk konfirmasi, dan adanya instalasi KLB yang melaksanakan respon KLB;
- Tersedia anggaran tambahan untuk pengadaan BHP, khususnya untuk penanganan COVID-19

Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pelaksanaan indikator ini adalah birokrasi penyampaian informasi dan permintaan bantuan pada kejadian luar biasa dan bencana di wilayah layanan.

Solusi dalam upaya pemenuhan target dan pelayanan terhadap masyarakat maka kegiatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan jejaring dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Upaya ini dilakukan baik secara langsung melalui kegiatan penyelidikan, penanggulangan, dan koordinasi maupun melalui penguatan jejaring lintas program dan lintas sektor dalam rangka mendukung SKD dan KLB melalui hasil konfirmasi laboratorium.

4 Teknologi tepat Guna yang Dihasilkan

Definisi Operasional

Kegiatan Penyiapan, rancang bangun, Uji Coba Skala Lab, Uji Coba skala Lapangan untuk TTG baru, pada tahun yang sama juga melakukan Sosialisasi pada masyarakat untuk jenis TTG yang dihasilkan tahun sebelumnya

Cara Perhitungan

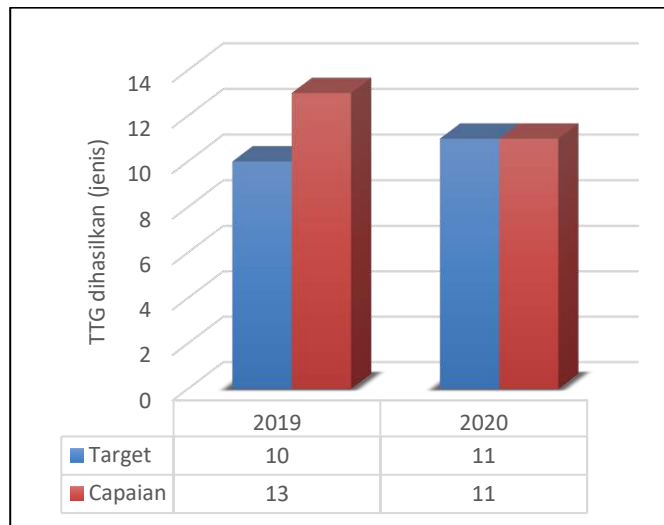
Jumlah teknologi tepat guna (TTG) baru yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan hasil kajian atau hasil surveilans

Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 11 jenis dari target 11 jenis, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 100% dengan perhitungan:

$$\text{Presentase capaian} = \frac{11 \text{ jenis}}{11 \text{ jenis}} \times 100\% = 100\%$$

Target dan capaian indikator pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya terlihat pada gambar berikut:

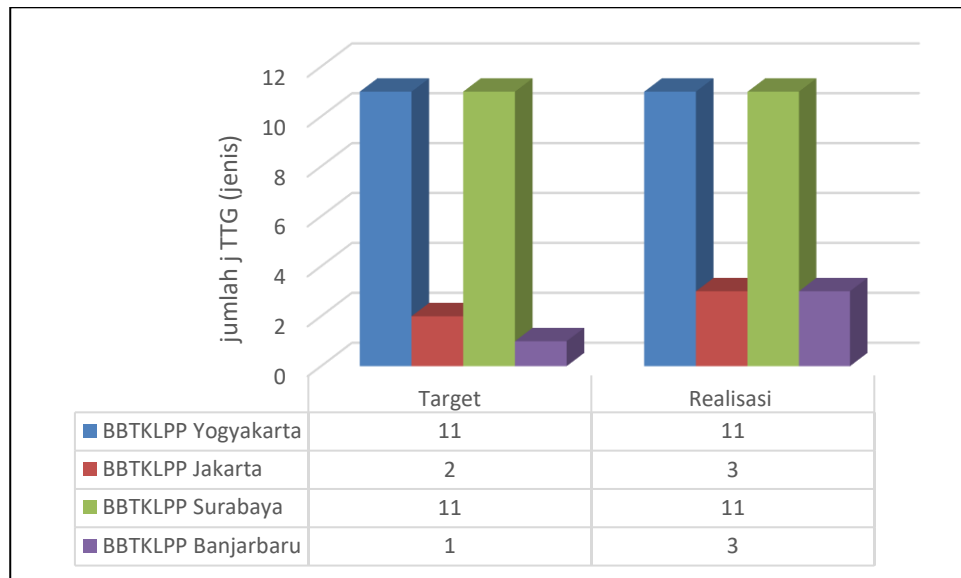


Gambar 13. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator "Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan" Tahun 2019 dan 2020

Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 mencapai target yang sama besar yang ditetapkan, yaitu 11 jenis dari target 11 jenis. Jika dibandingkan, pencapaian indikator kinerja tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena produksi jenis TTG mengalami perubahan arah kebijakan, yang mana rencana pengembangan jenis rancang TTG diarahkan kepada prioritas TTG penanggulangan penularan COVID-19. Pengalihan prioritas ini tidak mendapatkan cukup kelonggaran pendanaan sehubungan dengan alokasi anggaran yang ada lebih terfokus pada penanganan COVID-19, utamanya untuk

pemeriksaan sampel dan penunjang laboratorium lainnya, serta kegiatan PE dan tracing kontak di lapangan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2019, produk TTG BBTCLPP Yogyakarta menurun.

Perbandingan realisasi target indikator kinerja pada tiga BBTCLPP dapat dilihat melalui Gambar berikut:



Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator "Teknologi Tepat Guna yang Dihasilkan" Tahun 2020

Dari Gambar 14 terlihat bahwa target indikator ini berbeda pada masing-masing BBTCLPP. Target tertinggi berada pada BBTCLPP Yogyakarta dan Surabaya, disusul BBTCLPP Jakarta, dan yang paling rendah BBTCLPP Banjarbaru. Realisasi indikator pada keempat BBTCLPP tercapai sesuai target yang ditentukan, bahkan sebagian melebihi target. BBTCLPP Yogyakarta dan Surabaya menghasilkan TTG terbanyak, yaitu masing-masing 11 dari target 11.

Target indikator ini terpenuhi pada tahun 2020 melalui perancangan teknologi yang dihasilkan BBTCLPP Yogyakarta sebanyak 11 jenis (100%) dengan rincian sebagai berikut:

1. Model Teknologi Pengolah Limbah Medis Model 1
2. Model Teknologi Pengolah Limbah Medis Model 2,
3. Model Teknologi Sterilisator Uang 1 Model,
4. Model Teknologi *Automatic Handsanitizer* 1 Model
5. Alat Desinfeksi Ruang COVID
6. Sterilisator APD dengan Teknik UFO Sirkulator
7. Pengembangan Model/Teknologi Sterilisasi Kontainer Air Minum Isi Ulang
8. Model/Teknologi *Reminder Machine* PHBS
9. Model/Teknologi *Smart Hand Washer* untuk COVID-19

10. Model/ Teknologi Sterilisasi Udara Yankes Teknologi Hepa Nuvos
11. Model/Teknologi *Trolley Food Warmer* di Fasyankes

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

Sumber daya ini merupakan SDM yang terlibat dalam perancangan dan implementasi model/TTG. Tahun 2020, sebagian model/TTG diarahkan untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk mendukung pencapaian indikator ini, ada 3 orang ASN yang mendapat penugasan. Ketiga ASN tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang pejabat fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan. Efisiensi SDM dilakukan dengan penetapan pelaksana kegiatan melalui SK Tim Kegiatan pada Bidang PTL yang memang memiliki tugas terkait perancangan model/TTG. Dengan adanya SK, dapat diastikan bahwa setiap tenaga Fungsional bermanfaat seoptimal mungkin dalam pelaksanaan seluruh kegiatan utamanya serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga Fungsional yang berkompeten.

2. *Machines*

Efisiensi dalam pembuatan TTG dilakukan dengan penggunaan pihak ketiga dalam pembuatannya. Sehingga menghindari produk kemahalan dan sisa produk yang sulit dalam pencatatan. Hal ini juga mendukung efisiensi dalam pencatatan BMN dari petugas BMN.

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 100% ini adalah Rp127.793.000, namun yang digunakan sebesar Rp124.612.800 atau 97,51% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

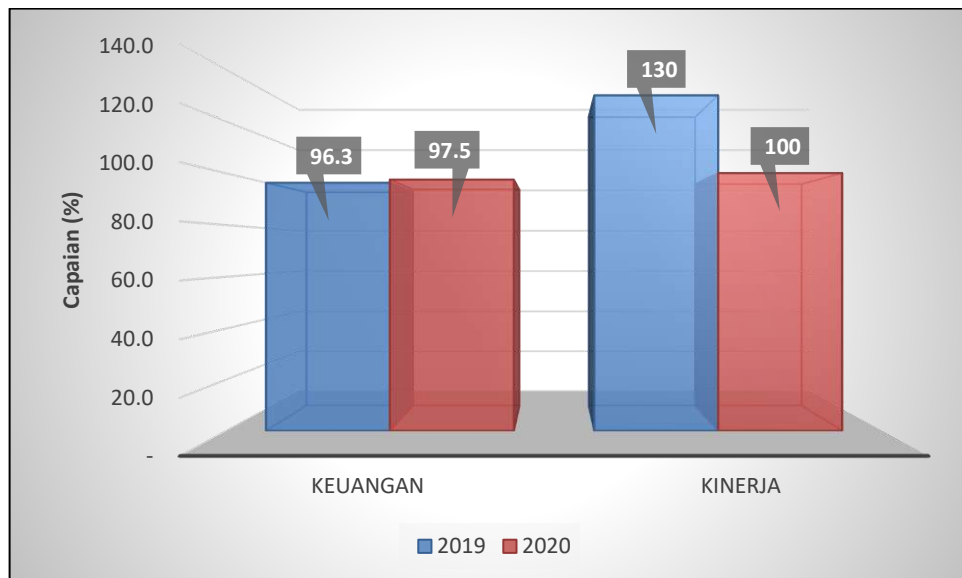
- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp127.793.000; RAKi = Rp124.612.800; CKi = 100% (1), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{((127.793.000 \times 1) - \text{Rp}124.612.800)}{(127.793.000 \times 1)} \times 100\% \\
 &= \frac{3.180.200}{127.793.000} \times 100\% \\
 &= 2,49\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,49%.

Perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja tahun 2020 dan 2019 terlihat pada gambar berikut:



Gambar 15. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta untuk Indikator "Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan" Tahun 2020 dan 2019

Dari Gambar di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran meningkat pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, namun capaian realisasi kinerja turun. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 produksi jenis TTG mengalami perubahan arah kebijakan dimana rencana pengembangan jenis rancang TTG diarahkan

kepada prioritas TTG penanggulangan penularan COVID-19. Pengalihan prioritas ini tidak mendapatkan cukup kelonggaran pendanaan sehubungan dengan alokasi anggaran yang ada lebih terfokus pada penanganan Covid19 utamanya untuk pemeriksaan sampel dan penunjang laboratorium lainnya serta kegiatan PE dan tracing kontak di lapangan. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2019 produk TTG BBTCLPP Yogyakarta termasuk menurun.

4. *Method*

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan penyesuaian cara pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan. Contohnya pelaksanaan uji fungsi yang disinergikan dengan sosialisasi penggunaan/implementasi TTG di lokasi tempat TTG diserahkan, sehingga efisien dalam tenaga dan anggaran.

5. *Materials*

Efisiensi material dalam menghasilkan TTG dilakukan dengan penyerahan pembuatan kepada pihak ketiga sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh BBTCLPP Yogyakarta. Metode ini dapat menghindari kemahalan produk dan sisa produk yang sulit dalam pencatatan. Hal ini juga mendukung efisiensi dalam pencatatan BMN dari petugas BMN.

Analisis Keberhasilan Capaian

Indikator sasaran ini dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan model/teknologi sebagai solusi terhadap situasi penyakit maupun faktor risiko sesuai dengan prioritas yang menjadi masalah kesehatan, antara lain membuat rancangan model/teknologi yang mendukung pencegahan/pengendalian COVID-19. Model/teknologi yang dikembangkan antara lain: Model Teknologi *Automatic Handsanitiser*; Alat Desinfeksi Ruangan COVID; Model/Teknologi Smart Hand Washer untuk COVID-19; Model/Teknologi Sterilisator APD Dengan Teknik Uvo Circulator Untuk Covid-19
- Optimalisasi sumber daya yang ada di Bidang PTL khususnya Instalasi PPTTG.

Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pencapaian target indikator ini terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak perubahan beberapa jenis alat yang akan dirancang dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, sementara anggaran awal bukan untuk COVID-19.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan revisi anggaran untuk jenis TTG yang dirancang untuk mendukung penanganan COVID-19.

Dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan tersebut akan dilakukan koordinasi kepada unit utama untuk mendapatkan rujukan sesuai peraturan yang berlaku.

5 Nilai Kinerja Anggaran

Definisi Operasional

Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata-rata geometrik.

Cara Perhitungan

Realisasi volume kegiatan/target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan/target indikator kegiatan

Analisa dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 94,92 dari target 80, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 118,65% dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{94,92}{80} \times 100\% = 118,65\%$$

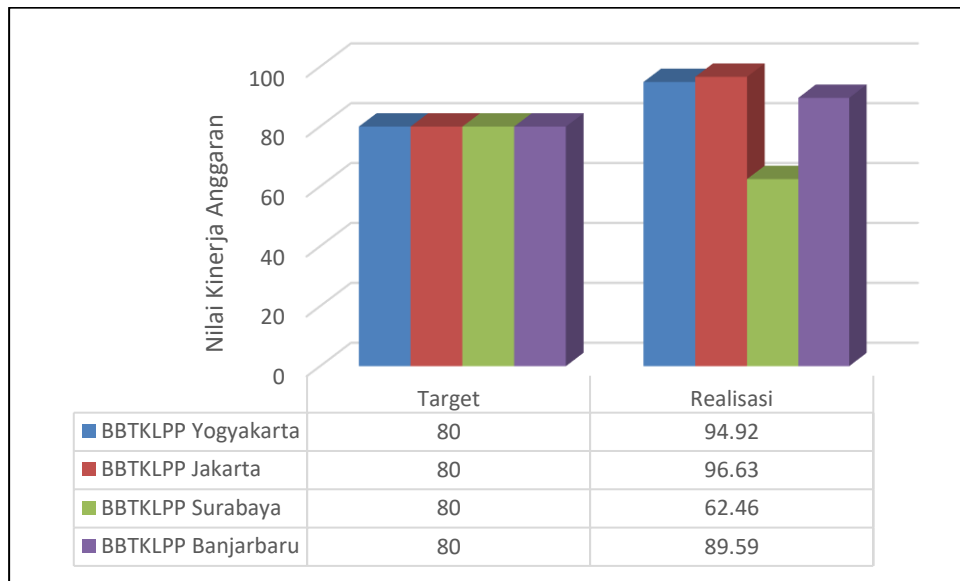
Pada tahun 2019, indikator ini tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam RAK BBTCLPP Yogyakarta. Indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2020, yang dituangkan dalam dokumen RAK tahun 2020-2024. Sekalipun demikian, capaian indikator tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Berdasarkan *dashboard* SMART DJA tahun 2019, nilai kinerja anggaran BBTCLPP Yogyakarta adalah 87,82, sementara realisasi tahun 2020 adalah 94,92. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi dibanding tahun 2019.

Jika dianalogkan bahwa target indikator 2019 sama dengan tahun 2020, yaitu 80, maka capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{87,82}{80} \times 100\% = 109,78\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini antara BBTCLPP Yogyakarta dengan BBTCLPP lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator "Nilai Kinerja Anggaran" Tahun 2020

Pada Gambar 16 terlihat bahwa ketiga BBTCLPP menetapkan target yang sama untuk indikator ini. Dari empat BBTCLPP, terdapat satu dari antaranya yang tidak mencapai target kinerja, yaitu BBTCLPP Surabaya karena hanya mencapai 62,46, sementara tiga BBTCLPP lain melebihi target. BBTCLPP Jakarta mencapai target tertinggi, yaitu 96,63.

Target indikator ini pada tahun 2020 tercapai melalui upaya sebagai berikut:

1. Notifikasi melalui surat elektronik secara rutin setiap akhir bulan kepada Bagian/Bidang tentang penyampaian monev anggaran dan kinerja
2. Melakukan monev terhadap anggaran dan kinerja melalui aplikasi e-monev SMART DJA
3. Melaporkan hasil monev kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindak lanjut
4. Mengikuti pertemuan/bimtek terkait monev anggaran yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, sehingga selalu ter-update dengan informasi-informasi terbaru

Melalui upaya tersebut, aplikasi SMART DJA menunjukkan perolehan hasil penilaian tahun 2020 terhadap variabel-variabel berikut:

1. Penyerapan anggaran sebesar 94.12%
2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar 85.27%
3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar 98.34%
4. Capaian keluaran sebesar 100%
5. Efisiensi sebesar 14.11%

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

BBTKLPP Yogyakarta memberdayakan SDM yang tersedia seoptimal mungkin dalam pelaksanaan monev anggaran dan kinerja serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten. Contohnya adalah PNS yang semula ditugaskan sebagai SATPAM, dialih tugaskan menjadi petugas *office* (Kepegawaian) untuk menyikapi kurangnya personil Kepegawaian setelah dilakukan kaderisasi. Dengan demikian, kegiatan dalam pencapaian target kinerja, khususnya pada Sub Bagian Umum, dapat terlaksana sesuai target dan jadwal sehingga berkontribusi terhadap nilai rincian volume kegiatan pada SMART DJA. Hal ini merupakan perwujudan efisiensi untuk mendukung pencapaian Indikator Nilai kinerja anggaran

2. *Machines*

Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan perangkat pengolahan data yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, termasuk monev anggaran dan kinerja.

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 118,65% ini berjumlah Rp127.793.000, namun yang digunakan sebesar Rp124.612.800 atau 97,51% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp260.484.000; RAKi = Rp260.482.150; CKi = 118,65% (1,19), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{((260.484.000 \times 1,19) - 260.482.150)}{(260.484.000 \times 1,19)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{49.493.810}{309.975.960} \times 100\% \\
 &= 15,97\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,97%.

4. *Method*

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesain/penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka, dialihkan secara virtual/online menggunakan platform Zoom Meeting/Google Meet/webinar, dengan tetap memenuhi tujuan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain diklat, pelatihan, desk/review, koordinasi, sosialisasi, diseminasi informasi. Contoh lain adalah konsultasi teknis dilakukan melalui telepon atau WA.

5. *Materials*

Efisiensi dilakukan melalui penyediaan data-data yang berasal dari satu sumber, misal data realisasi anggaran dari pengelola keuangan sekalipun penanggung jawab penggunaan anggaran tersebut ada di Bidang/Bagian

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan:

- Melakukan revisi DIPA/POK dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dan implementasi kegiatan di lapangan dalam rangka menjaga kinerja penyerapan anggaran
- Penyampaian usulan kebutuhan penambahan anggaran ataupun bantuan logistic dalam rangka terlaksananya kegiatan dalam rangka pemenuhan target kinerja capaian keluaran
- Melakukan revisi halaman III DIPA dalam rangka menjaga kinerja RPK/RPD
- Penerapan pertanggungjawaban kwitansi secara riil cost pada pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja efisiensi

Hambatan dan Solusi

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini:

- Pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan hingga semester 2 yang berakibat terhadap pengalihan beberapa kegiatan menjadi kegiatan yang menunjang kebutuhan penanganan COVID-19 yang masih harus direvisi anggarannya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan RPK/RP/ROK yang telah disusun

- Lamanya proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga RPD meleset dari perkiraan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah:

- Penyesuaian besaran RPD dengan realisasi pengeluaran pada saat revisi anggaran
- Mendorong penanggung jawab kegiatan untuk secepatnya menyelesaikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan

6 Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

Definisi Operasional

Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Cara Perhitungan

Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan prosentase maksimal 100%

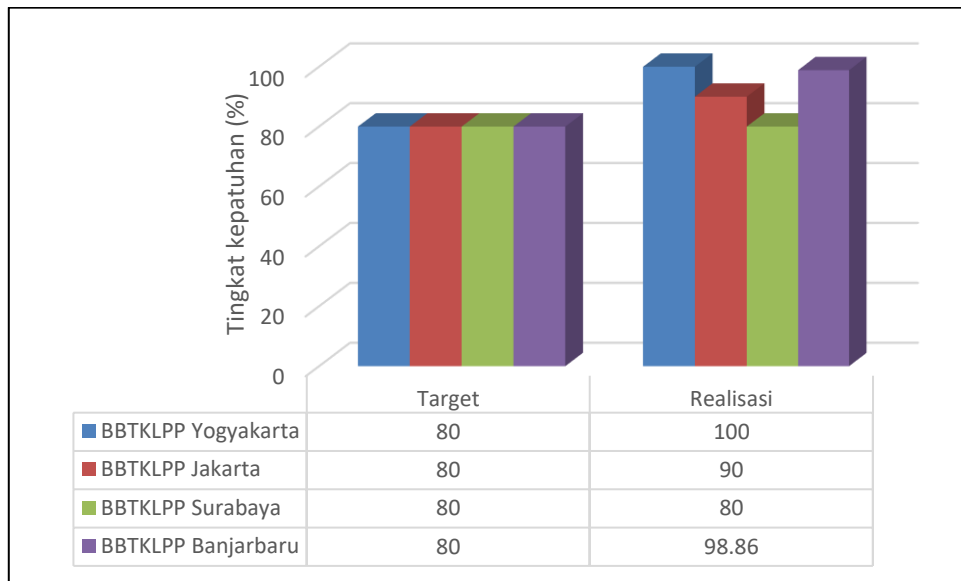
Kecuali untuk pelaporan bulan Januari – Mei Terdapat Kebijakan dari Kementerian Keuangan dilakukan Upload di bulan Juni sesuai surat S-537/PB/2020 Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020

Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target 80%, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 125%, dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja ini pada BBTCLPP Yogyakarta dan BBTCLPP lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 17. Perbandingan Capaian Kinerja BBTKLPP Yogyakarta, BBTKLPP Jakarta, BBTKLPP Surabaya, dan BBTKLPP Banjarbaru untuk Indikator “Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan” Tahun 2020

Gambar 17 menunjukkan bahwa keempat BBTKLPP menetapkan target yang sama, yaitu 80%. Realisasi target berhasil dicapai oleh keempat BBTKLPP, dengan realisasi tertinggi dicapai oleh BBTKLPP Yogyakarta.

Indikator ini tercapai melebihi target melalui upaya sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi internal (SAIB dan SIMAK-BMN) sebelum di-upload
2. Meng-*upload* Laporan Keuangan tepat waktu setiap bulan
3. Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN secara rutin
4. Mengikuti *e-reviu* yang diselenggarakan Eselon I dan APIP, sehingga selalu ter-update dengan informasi-informasi terbaru

Melalui upaya-upaya ini, diperoleh hasil penilaian terhadap 5 parameter sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu upload: 100
2. Status rekonsiliasi: 100
3. Hasil rekonsiliasi: 100
4. Rekonsiliasi internal SAK dan SIMAK-BMN: 100
5. Jumlah upload: 100

Dari penilaian terhadap 5 parameter tersebut, maka diperoleh capaian untuk indikator ini sebesar 100%

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

BBTKLPP Yogyakarta memberdayakan SDM yang tersedia seoptimal mungkin dalam pengelolaan anggaran serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten. Contohnya adalah PNS yang tugas utamanya sebagai pengelola SIMAK-BMN dan penyusun Laporan Keuangan, diberdayakan juga sebagai pengelola keuangan, sehingga lebih gampang memahami kebutuhan terkait. Dengan demikian, kegiatan dalam pencapaian target kinerja, khususnya pada Sub Bagian Umum, dapat terlaksana sesuai target dan jadwal sehingga berkontribusi terhadap pencapaian indikator ini.

2. *Machines*

Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan perangkat pengolahan data yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengelolaan anggaran, dalam rangka mencapai indikator ini.

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 125% ini berjumlah Rp25.537.875.000, namun yang digunakan sebesar Rp23.418.772.822 atau 91,7% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp25.537.875.000; RAKi = Rp23.418.772.822; CKi = 125% (1,25), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{((25.537.875.000 \times 1,25) - 23.418.772.822)}{(25.537.875.000 \times 1,25)} \times 100\% \\ &= \frac{8,503,570,928}{31,922,343,750} \times 100\% \\ &= 26,64\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 26,64%.

4. *Method*

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesign/penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah rekonsiliasi tidak dilakukan dengan tatap muka, tapi dengan meng-upload file Laporan Keuangan. Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka, dialihkan secara virtual/online menggunakan platform Zoom Meeting, salah satunya reviu Laporan Keuangan

5. *Materials*

Efisiensi dilakukan dengan penerapan *paperless* dengan cara meminimalisir penggandaan *hardcopy* Laporan Keuangan, baik untuk keperluan dokumentasi maupun reviu

Analisis Keberhasilan Capaian

Indikator kinerja ini tercapai karena hal sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan dan petugas SAIBA dan SIMAK-BMN dalam mematuhi ketentuan terkait penyampaian Laporan Keuangan
- Koordinasi yang intens dengan KPPN dan Eselon I

Hambatan dan Solusi

Hambatan yang dihadapi antara lain:

- Butuh waktu banyak untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Keuangan karena data bersumber dari beberapa pihak, antara lain: petugas SIMAK-BMN, pengelola persediaan, pengelola PNBPN.
- Kekurangan dokumen dalam proses transfer masuk barang yang perolehannya dari Eselon I

Solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi secara intens, baik internal maupun eksternal (Eselon I) untuk sehingga tidak melewati batas akhir penyampaian Laporan Keuangan setiap bulan.

7 Kinerja Implementasi Satker WBK

Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

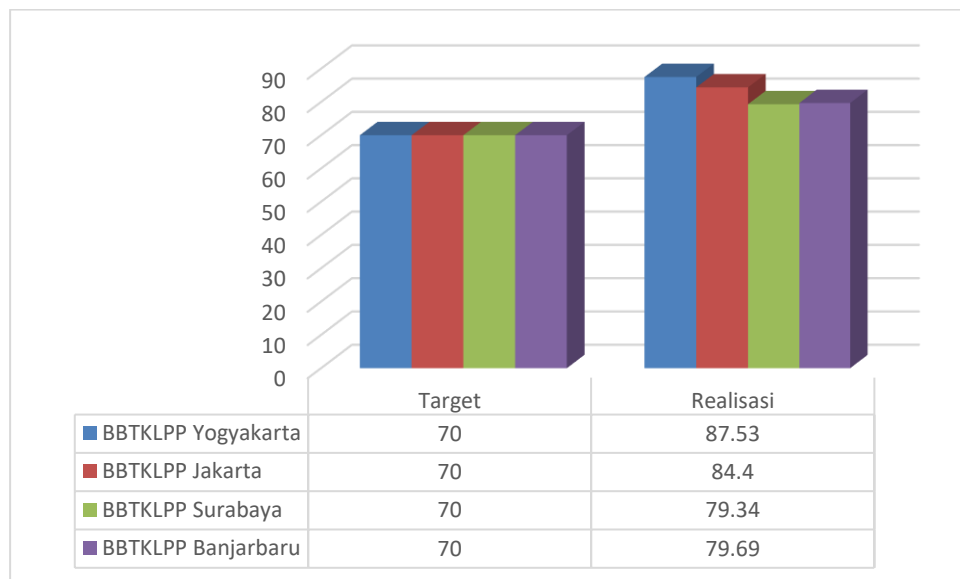
Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 87,53 dari target 70, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 125,04% dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{87,53}{70} \times 100\% = 125,04\%$$

Realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah digunakan sebagai indikator penilaian satker.

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja ini pada BBTCLPP Yogyakarta dan BBTCLPP lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 18. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator "Kinerja Implementasi Satker WBK" Tahun 2020

Gambar 18 menunjukkan bahwa keempat BBTCLPP menetapkan target yang sama, yaitu 70. Keempat BBTCLPP berhasil mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan.

Indikator ini tercapai melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pada 6 Pokja sebagai berikut:

- a. Pokja I. Manajemen Perubahan
 - Pembentukan tim kerja, antara lain Tim ZI menuju WBK, tim Agent of Change
 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI, baik 5 tahunan maupun tahunan
 - Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI
 - Penyelenggaraan perubahan pola pikir dan budaya kerja
- b. Pokja II. Penataan dan Tatalaksana
 - Monev pelaksanaan SOP
 - Monev pelaksanaan e-office
 - Monev pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- c. Pokja III. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Monev perencanaan kebutuhan pegawai
 - Monev pola mutasi internal
 - Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - Monev penetapan kinerja individu
 - Monev penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai
 - Monev sistem informasi kepegawaian
- d. Pokja IV. Penguatan Akuntabilitas
 - Memastikan keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas (perencanaan, monev, penilaian capaian kinerja)
 - Pengelolaan dokumen akuntabilitas (perencanaan, monev, penilaian capaian kinerja)
- e. Pokja V. Penguatan Pengawasan
 - Pengendalian gratifikasi
 - Penerapan SPIP
 - Pengaduan masyarakat
 - Pengelolaan WBS
 - Penanganan benturan kepentingan
- f. Pokja VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Monev penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan
 - Monev penyelenggaraan budaya pelayanan prima
 - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Hasil pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pencapaian kinerja indikator ini, adalah diperolehnya predikat WBK melalui proses sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2- 3 Juni 2020 telah dilaksanakan *self assesment* Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkes RI dengan hasil nilai total 87,53 atau meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai total 83,75.

2. Pada tanggal 6 November 2020 BBTCLPP Yogyakarta menerima Piagam WBK dari Menteri Kesehatan, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/6590/2020, yang menetapkan BBTCLPP Yogyakarta sebagai Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (pengungkit dan hasil) yang meningkat. Piagam tersebut membuktikan bahwa BBTCLPP Yogyakarta telah berhasil meningkatkan Manajemen Internal secara berkesinambungan
3. Pada tanggal 21 Desember 2020, BBTCLPP Yogyakarta menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK tingkat Nasional

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

BBTCLPP Yogyakarta memberdayakan SDM yang tersedia seoptimal mungkin dalam pembangunan ZI menuju WBK, serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten. BBTCLPP Yogyakarta memberdayakan SDM yang tersedia seoptimal mungkin dalam pembangunan ZI menuju WBK, serta memastikan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten. Pemberdayaan SDM dilakukan melalui pembentukan Tim ZI yang akan menjadi pelopor dalam langkah-langkah nyata meraih WBK yang dipilih dari SDM ASN yang berkompeten dan memberikan keterwakilan dari semua lini.

Anggota pokja diberikan pelatihan sesuai dengan penugasannya, seperti contohnya Pokja IV yang bekerja dalam pengawalan akuntabilitas diberikan keahlian khusus melalui pelatihan SAKIP, dan pemanfaatan sebagian besar tim Pokja V untuk duduk sebagai tim WBS, Dumas, UPG.

2. *Machines*

Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini, tanpa perlu pengadaan khusus untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ZI menuju WBK.

3. Money

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 125,04% ini berjumlah Rp237.713.000, namun yang digunakan sebesar Rp231.663.768 atau 97,5% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat di hitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp237.713.000; RAKi = Rp231.663.768; CKi = 125,04% (1,25), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{((237.713.000 \times 1,25) - Rp231.663.768)}{(237.713.000 \times 1,25)} \times 100\% \\ &= \frac{65.477.482}{297.141.250} \times 100\% \\ &= 22,04\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 22,04%.

4. Method

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesign/penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah penilaian WBK oleh tim internal dan eksternal yang semula dilakukan dengan tatap muka, dialihkan secara virtual/online menggunakan platform *Zoom Meeting*

5. Materials

Efisiensi dilakukan dengan penerapan *paperless* dengan cara meminimalisir penggunaan *hardcopy* Laporan Keuangan, baik untuk keperluan dokumentasi maupun review

Analisis Keberhasilan Capaian

Indikator sasaran ini tercapai karena dukungan sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan, tim WBK, serta seluruh anggota organisasi BBTCLPP Yogyakarta
- Pendampingan oleh tim APIP, khususnya dalam pelaksanaan *self assessment*
- Peningkatan pelayanan kepada pelanggan khususnya pelayanan teknis laboratorium dengan melengkapi fasilitas layanan berupa tempat bermain anak, spot charging, loket pemisah layanan Covid19 dan nonCovid19, waktu pelayanan, pengembangan sistem pelayanan SIL, permen, mesin kepuasan pelanggan dan lain sebagainya.
- Menjalin relasi baik dengan pelanggan melalui event temu pelanggan yang rutin dilakukan setiap tahun,

Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah belum semua anggota Pokja melaksanakan tugas sebagai tim ZI sesuai dengan tupoksi sehari-hari, sehingga butuh *effort* yang lebih untuk melaksanakan tugas dalam tim ZI.

Upaya/solusi yang dilakukan untuk untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi di kemudian hari adalah penyesuaian anggota tim ZI dengan tupoksi sehari-hari.

8 Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL

Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

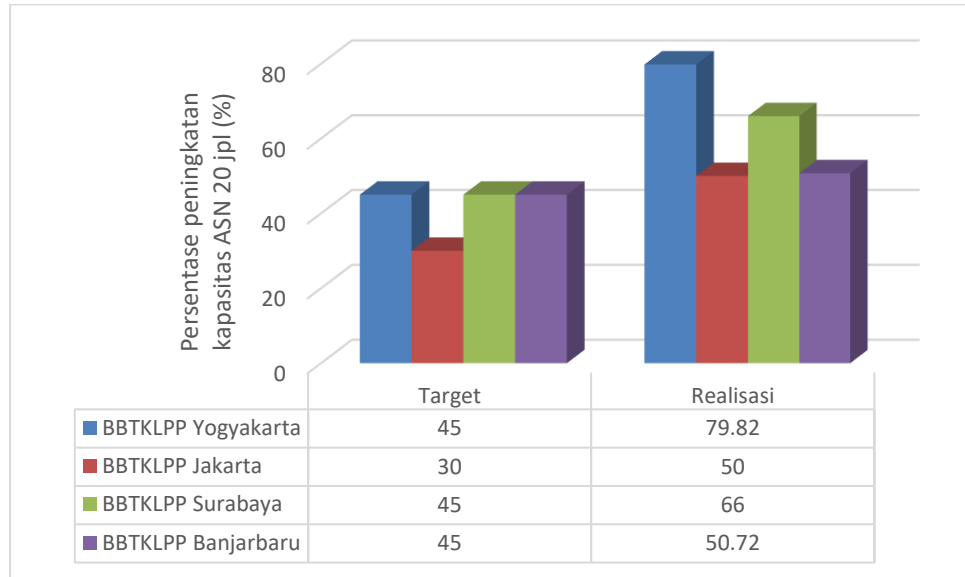
Analisis dan Capaian Indikator

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 79,82% dari target 45%, sehingga menunjukkan persentase capaian kinerja 177,37% dengan perhitungan:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{79,82\%}{45\%} \times 100\% = 177,37\%$$

Realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah digunakan sebagai indikator penilaian satker.

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja ini pada BBTCLPP Yogyakarta dan BBTCLPP lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Perbandingan Capaian Kinerja BBTCLPP Yogyakarta, BBTCLPP Jakarta, BBTCLPP Surabaya, dan BBTCLPP Banjarbaru untuk Indikator "Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL" Tahun 2020

Gambar 19 menunjukkan bahwa dari keempat BBTCLPP, 3 BBTCLPP menetapkan target yang sama (45%), sedangkan 1 BBTCLPP, yaitu BBTCLPP Jakarta menetapkan target 30%. Keempat BBTCLPP berhasil mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan. Realisasi tertinggi dicapai BBTCLPP Yogyakarta sebesar 79,82%

Indikator ini tercapai melalui pelaksanaan beberapa jenis upaya peningkatan kompetensi >20 JPL per tahun sebagai berikut:

- Tugas belajar: 1 orang
- Izin belajar: 1 orang
- Diklat teknis: 16 orang
- Seminar: 83 orang
- Workshop: 9 orang
- Sosialisasi: 2 orang
- E-learning: 1 orang

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan 5 sumber daya yang dikenal dengan 5 M (*Man, Machines, Money, Method dan Materials*) sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Man*

BBTKLPP Yogyakarta mengoptimalkan seluruh SDM BBTCLPP Yogyakarta untuk secara mandiri melakukan pemutakhiran pencatatan terhadap peningkatan kompetensi yang telah dilakukan baik menggunakan pembiayaan APBN maupun mandiri, baik atas penugasan maupun inisiasi sendiri.

Staf kepegawaian diberikan penugasan dalam pemberian *warning*/peringat sedang staf di perencanaan diberikan penugasan dalam kompilasi sekaligus sebagai bahan pengisian capaian indikator kinerja BBTCLPP Yogyakarta

2. *Machines*

Efisiensi terhadap sarana prasarana dalam pencapaian kinerja ini dilakukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini. Selama masa pandemi tahun 2020, pegawai mengikuti berbagai jenis peningkatan ASN secara mandiri karena sebagian besar diselenggarakan secara daring, sehingga dapat diikuti di ruang berikut sarana masing-masing

3. *Money*

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar 177,37% ini berjumlah Rp61.301.000, namun yang digunakan sebesar Rp59.905.550 atau 97,7% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut dalam menghasilkan capaian kinerja, dapat di hitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Dengan formula tersebut, maka: PAKi = Rp61.301.000; RAKi = Rp59.905.550; CKi = 177,37% (1,77), sehingga Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{((61.301.000 \times 1,77) - 59.905.550)}{(61.301.000 \times 1,77)} \times 100\% \\
 &= \frac{10.813.052.820}{10.872.958.370} \times 100\% \\
 &= 99,45\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, dalam pencapaian kinerja ini, dapat dilakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 99,45%.

4. Method

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dilakukan redesain/penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya adalah diklat/seminar/workshop/sosialisasi/e-learning diikuti secara virtual/online menggunakan platform *Zoom Meeting/Google Meeting/webinar*

5. Materials

Efisiensi dilakukan dengan penerapan *paperless*, antara lain untuk materi-materi dan sertifikat, sehingga ATK peserta dapat diminimalisir kebutuhannya.

Analisis Keberhasilan Capaian

Indikator sasaran ini tercapai karena hal sebagai berikut:

- Pegawai aktif mencari informasi penyelenggaraan diklat/seminar/workshop/sosialisasi/e-learning secara daring
- Dukungan jaringan internet
- Tersedia akun Zoom Meeting dan webinar

Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah:

- Topik pelatihan belum melingkupi semua tupoksi atau fungsional
- Belum semua pegawai melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti

Upaya/solusi yang dilakukan untuk untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi:

- Mengusulkan kepada pihak penyelenggara, terutama institusi diklat seperti Bapelkes atau institusi diklat lain sejenisnya, untuk menyelenggarakan topik pelatihan/seminar sesuai kebutuhan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran berdasar DIPA awal BBTCLPP Yogyakarta yang terbit pada Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp33.260.667.000,- . (Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah rupiah). Pada tahun 2020, terdapat 12 kali revisi DIPA/POK, yang mana beberapa kali terjadi perubahan pagu. Revisi ke-12 merupakan revisi terakhir yang terbit tanggal 16 November 2020, dengan pagu akhir Rp38.877.107.000, atau terdapat penambahan pagu sebesar Rp5.616.440.000.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2020

INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen tase (%)
1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	12.326.439.000	12.181.859.862	98,83
2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	21.990.000	21.446.500	97,53
3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	303.512.000	301.938.645	99,48
4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	127.793.000	124.612.800	97,51
5. Nilai kinerja anggaran	260.484.000	260.482.150	99,99
6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	25.537.875.000	23.418.772.822	91,70
7. Kinerja implementasi satker WBK	237.713.000	231.663.768	97,46
8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	61.301.000	59.905.550	97,72
JUMLAH	38.877.107.000	36.600.682.097	94,14

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran pada semua indikator mencapai >90%, namun untuk dapat mengetahui seberapa efisien anggaran tersebut untuk menghasilkan capaian kinerja, dapat dihitung menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai kinerja 133,45% adalah Rp38.877.107.000, namun yang digunakan sebesar Rp36.600.682.097 atau 94,14% dari total anggaran yang tersedia.

Dengan formula tersebut, maka: PAK_i = Rp38.877.107.000; RAK_i = Rp36.600.682.097
CK_i = 133,45% (1,33), sehingga Efisien dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(38.877.107.000 \times 1,34) - 36.600.682.097}{(38.877.107.000 \times 1,34)} \times 100\% \\ &= \frac{15.494.641.283}{52.095.323.380} \times 100\% \\ &= 29,74\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, secara keseluruhan BBTCLPP Yogyakarta telah melakukan efisien terhadap penggunaan anggaran sebesar 29,74% dalam pencapaian kinerjanya.

Revisi yang dilakukan sebagian besar untuk realokasi anggaran dalam rangka pemenuhan penanggulangan COVID-19. Realokasi anggaran juga dilakukan dalam rangka mengalihkan kegiatan tatap muka ke anggaran pengadaan website/ Online Conference untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan dengan tatap muka pada masa pandemic COVID-19, misalnya untuk kegiatan diklat, pelatihan, *desk/review*, koordinasi, sosialisasi, diseminasi informasi dan lain-lain. Karena fungsi pertemuan online ini bisa digunakan menyeluruh pada setiap kegiatan, upaya efisiensi tersebut dapat mendukung pencapaian seluruh Indikator

B. PENGHARGAAN

Beberapa sertifikat penghargaan dan pengakuan kompetensi yang dimiliki BBTCLPP Yogyakarta sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri PAN-RB tanggal 21 Desember 2020 sebagai Unit Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2. Piagam WBK dari Menteri Kesehatan RI tanggal 6 November 2020 sebagai Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (pengungkit dan hasil) yang meningkat
3. Penghargaan Juara I Kompetisi Penilaian Kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja & Unit Pengelola Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019;
4. Penghargaan Juara II Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 (Monster da Ruwat RS);
5. Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Juara 3 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, kolaborasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 (Steam Asraji)
6. Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Juara Harapan I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 Kategori Pelayanan Publik Inklusif untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Secodi)
7. Penghargaan sebagai Juara I Kompetensi Penilaian Kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja dan Unit Pengelola Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
8. Penghargaan sebagai Juara I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dengan SAKU KEJEPIT (Sehat AirKU berupa KEmasan penJernih yang Praktis Inovatif Teruji) dari Menteri Kesehatan RI yang ditetapkan Tanggal 5 November 2018;
9. Sertifikat ISO 9001:2015 yang ditetapkan Transpacific Certifications Limited Tanggal 16 Agustus 2018 dan berlaku sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2021;

10. Tanda penghargaan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Kesehatan RI yang ditetapkan Tanggal 6 November 2018;
11. Sertifikat Paten untuk Inovasi Kit Penjernih Air dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan Tanggal 16 Oktober 2018;
12. Sertifikat Paten untuk Inovasi Pewarna Makanan/Minuman Alami dan Proses Pembuatannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan Tanggal 24 Oktober 2018;
13. Sertifikat re-akreditasi ke-3 LP-1251-IDN sebagai Laboratorium Penguji sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005) yang ditetapkan Komite Akreditasi Nasional Tanggal 23 November 2017 dan berlaku sampai dengan Tanggal 22 November 2021;
14. Sertifikat re-akreditasi ke-1 LK-131-IDN sebagai Laboratorium Kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005) yang ditetapkan Komite Akreditasi Nasional Tanggal 17 Oktober 2017 dan berlaku sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2018;
15. Penghargaan dari Direktur Jenderal P2P atas Penyerapan Anggaran Tertinggi Ditjen P2P sampai dengan Bulan Agustus T.A 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017
16. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium yang ditetapkan Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 0020/LP1/LABLINH/LRK/KLH tanggal 28 Januari 2014
17. Penghargaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 April 2014
18. Tanda Penghargaan sebagai Unit Percontohan Citra Pelayanan Prima Bidang Kesehatan Tahun 2004 sesuai Kepmenkes RI No. 1248/Menkes/SK/XI/2004 tanggal 25 November 2004

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan pencapaian kinerja BBTCLPP Yogyakarta tahun 2020 sebagai berikut:

1. Secara umum capaian kinerja BBTCLPP Yogyakarta sudah memenuhi target dengan rerata persentase capaian indikator sasaran sebesar 133,45%;
2. Indikator utama dan seluruh indikator telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 94,14% dari total pagu yang tersedia.
4. Dalam pencapaian kinerja sebesar 133,45%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran termasuk 29,74%

B. TINDAK LANJUT

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pencapaian yang telah sesuai dengan target dan mempersiapkan untuk pencapaian target berikutnya
2. Mereviu dokumen Rencana Aksi secara berkala dalam rangka penyesuaian kebijakan dan peraturan yang berlaku

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penghargaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irene, MKM
Jabatan : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 38,877,107,000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 November 2020

Pihak Kedua,

dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

Pihak Pertama,

Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-3
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YOGYAKARTA**

NO	NAMA SASARAN	NO	NAMA INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 Rekomendasi
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25 %
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90 %
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	11 Jenis
		5	Nilai kinerja anggaran	80
		6	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %
		7	Kinerja implementasi WBK satker	70
		8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	10,001,584,000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	28,875,523,000,-
TOTAL		Rp.	38,877,107,000,-

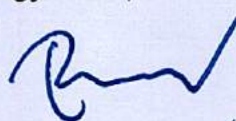
Jakarta, 9 November 2020

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta,



dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002



Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irene, MKM
Jabatan : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Achmad Yurianto
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 35,760,667,000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2020

Pihak Kedua,

dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001

Pihak Pertama,

Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YOGYAKARTA**

NO	NAMA SASARAN	NO	NAMA INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	87 Rekomendasi
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25 %
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90 %
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	11 Jenis
		5	Nilai kinerja anggaran	80
		6	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %
		7	Kinerja implementasi WBK satker	70
		8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	6,885,144,000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	28,875,523,000,-
TOTAL		Rp.	35,760,667,000,-

Jakarta, Juli 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta,



dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001



Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irene, MKM

Jabatan : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 33.260.667.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2019

Pihak Kedua,

dr. Anung Sugihantono, M. Kes
NIP 196003201985021002

Pihak Pertama,

Dr. dr. Irene, MKM
NIP 197206032002122008

The page features a decorative border of colorful geometric shapes, including triangles, squares, and circles, in shades of blue, yellow, pink, and black, scattered in the top-left and bottom-right corners. The main title is centered in a bold, blue, outlined font.

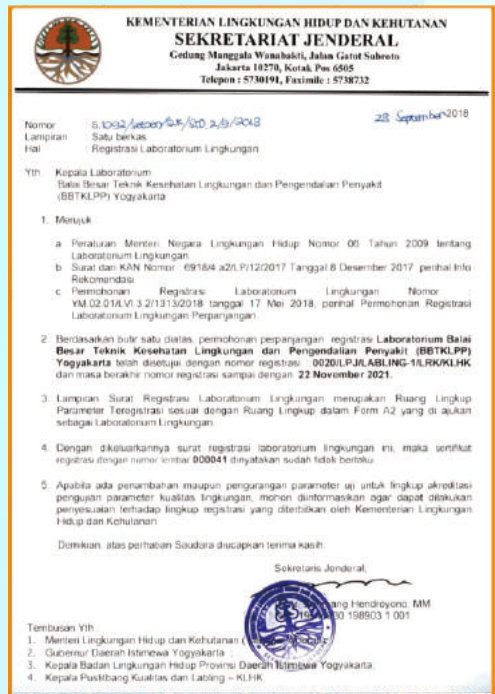
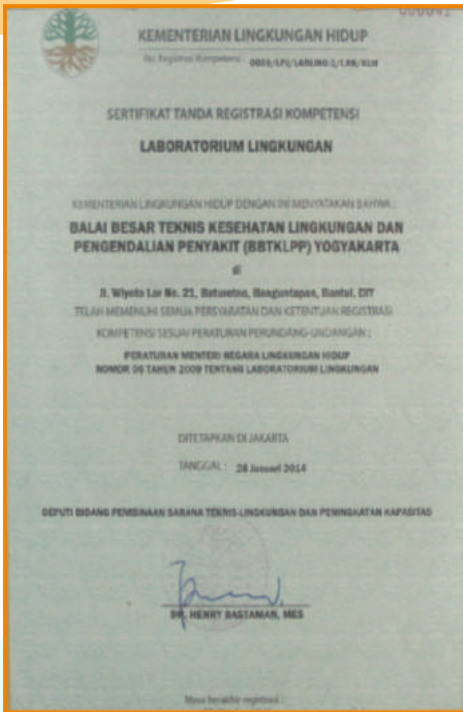
SERTIFIKAT DAN PENGHARGAAN



Sertifikat akreditasi LP-251-IDN sebagai Laboratorium Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005) yang ditetapkan Komite Akreditasi Nasional tanggal 23 November 2017 dan berlaku sampai dengan 22 November 2021.



Sertifikat akreditasi LK-131-IDN sebagai Laboratorium Kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005) yang ditetapkan Komite Akreditasi Nasional tanggal 17 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022



Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa BBTKLPP Yogyakarta telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan registrasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.



Sertifikat ISO 9001:2015



Penghargaan dari Direktur Jenderal P2P sebagai Kategori terbaik Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2014



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

TANDA PENGHARGAAN

kepada

*Balai Besar
Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pemberantasan Penyakit Menular
(BBTKL-PPM)
Yogyakarta*

"UNIT PERCONTOHAN CITRA PELAYANAN PRIMA BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2004"
(KEP. MENKES RI NOMOR : 1348/MENKES/SK/XI/2004)

Jakarta, 25 Nopember 2004.

MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Unit Percontohan Citra Pelayanan Prima Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2004



Penghargaan dari Direktur Jenderal P2P atas Penyerapan Anggaran Tertinggi Ditjen P2P sampai dengan Bulan Agustus T.A 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

PENGHARGAAN

kepada :

BTKLPP Yogyakarta

sebagai

Juara I

Kompetisi Penilaian Kepatuhan
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Satuan Kerja & Unit Pengelola Teknis
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Tahun 2019

Jakarta, 10 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN,


NILA FARID MOELOEK

Penghargaan Juara 1
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2018
Kategori Pelayanan Publik Inklusif Untuk
Memajukan Kesejahteraan Masyarakat
(SAKU KEJEPIT)

Penghargaan Juara 1 Kompetisi Penilaian
Kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja & Unit
Pengelola Teknis di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun 2019



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

**PENGHARGAAN KEPADA PEMENANG LOMBA
DALAM RANGKA
HARI KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2018**

kepada :

BTKLPP Yogyakarta
SAKU KEJEPIT (sehat air-ku berupa
kemasan penjemih yang praktis inovatif teruji)
(Pelayanan Publik Inklusif Untuk Memajukan
Kesejahteraan Masyarakat)

sebagai

Juara I

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Kementerian Kesehatan Tahun 2018

(Kep. Menkes RI Nomor : KP.04.04/Menkes/628/2018)

Jakarta, 6 November 2018

MENTERI KESEHATAN,


NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

PENGHARGAAN

kepada :

Monster Da Ruwat RS : Mikro Organisme Nozokomial
Sterilisator Udara Ruang Perawatan Rumah Sakit
BBTKLPP Yogyakarta

sebagai

Juara 2

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi Dalam
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jakarta, 15 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN,


NILA FARID MOELOEK

Penghargaan Juara 2

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi
Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
(Monster Da Ruwat RS)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

PENGHARGAAN

kepada :

Steam Asraji (Sterilisasi Alat Makan Di Asrama Haji)
BBTKLPP Yogyakarta

sebagai

Juara 3

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi Dalam
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jakarta, 15 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN,


NILA FARID MOELOEK

Penghargaan Juara 3

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi
Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
(Steam Asraji)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

memberikan

PENGHARGAAN

kepada :

Desa Secodi
(Desinfeksi Air Sederhana Berupa Chlorine Diffuser)
BBTKLPP Yogyakarta

sebagai

Juara Harapan 1

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kategori
Pelayanan Publik Inklusif Untuk Memajukan
Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta, 15 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN,


NILA FARID MOELOEK

Penghargaan Juara Harapan 1
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun 2019
Kategori Pelayanan Publik Inklusif Untuk
Memajukan Kesejahteraan Masyarakat
(Desa Secodi)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugrahkan

**TANDA PENGHARGAAN
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

kepada :

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT (BBTKLPP)
YOGYAKARTA**

sebagai

Unit Kerja yang Menerapkan Indikator
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Tahun 2018

(Kep. Menkes RI Nomor : KP.04.04/Menkes/628/2018)

Jakarta, 6 November 2018
MENTERI KESEHATAN,

NILA FARID MOELOEK

Penghargaan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan
Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018



Sertifikat Paten Pewarna Makanan/Minuman Alami dan Proses Pembuatannya

Sertifikat Paten Kit Penjernih Air





Surat Pencatatan Ciptaan Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Manajemen Laporan (eSIMPEL) BBTCLPP Yogyakarta

Surat Pencatatan Ciptaan Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Manajemen Data Terpadu (eSIMDADU) BBTCLPP Yogyakarta





Surat Pencatatan Ciptaan Sistem Informasi Capaian Kinerja Terpadu (SICAKEP) BBTCLPP Yogyakarta

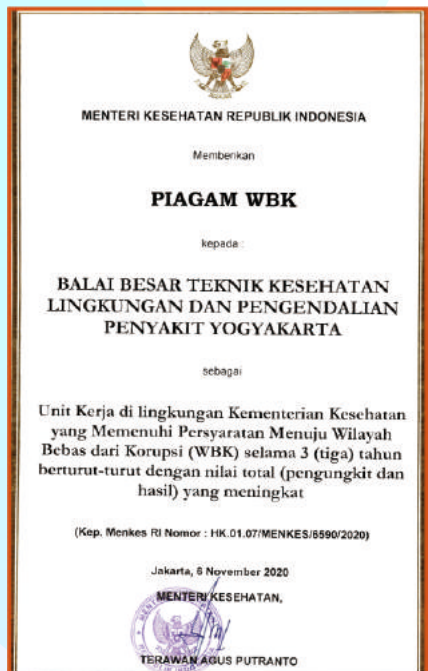


Surat Pencatatan Ciptaan Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Laboratorium (ESIL) BBTCLPP Yogyakarta



Surat Pencatatan Ciptaan Elektronik Layanan Akses Informasi Pelanggan (ELANG) BBTCLPP Yogyakarta

Piagam Penghargaan WBK Sebagai Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (pengungkit dan hasil) yang meningkat





Piagam Penghargaan Sebagai Satker Dengan Pengelolaan Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Terbaik Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Yogyakarta



Penghargaan Atas Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak T.A 2014 Terbaik Kategori Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan



Penghargaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbaik Tahun Anggaran 2014



Piagam Penghargaan Kerjasamanya dalam Mendukung Pemeriksaan PCR/Swab Masif Covid-19 Kabupaten Banyumas



Piagam Penghargaan
“POS BERSAMA LEBARAN 1440 H”
29 Mei - 11 Juni 2019

SERTIFIKAT PATEN
PEMBERSIH TANGAN ALAMI
DAN PROSES PEMBUATANNYA



